

# Penyusunan Peta Potensi Investasi Kota Malang

► Laporan Akhir

2020

**Kerjasama:**



**Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Malang**



**Badan Pertimbangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (BP3M)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Brawijaya**





## DAFTAR ISI

Daftar Tabel .....	iv
Daftar Bagan .....	v
Daftar Peta .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Kegiatan .....	5
1.3 Tujuan Kegiatan .....	6
1.4 Sasaran Kegiatan .....	6
1.5 Referensi Hukum Kegiatan .....	6
1.6 Keluaran / <i>Output</i> Kegiatan .....	6
<b>BAB II. KERANGKA KAJIAN</b> .....	<b>8</b>
2.1 Pertumbuhan <i>Output</i> dan Investasi .....	8
2.1.1 Pertumbuhan Output .....	8
2.1.2 Pengertian Investasi .....	10
2.1.3 Teori Investasi Keynes .....	11
2.1.1 Iklim Investasi Wilayah .....	15
2.1.2 Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Teori Keynes) .....	17
2.1.3 Pengaruhi Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Teori Harrod-Domar) .....	18
2.1.4 Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Teori Solow-Swan) .....	21
2.1.5 Teori Kutub Pertumbuhan ( <i>The Growth Pole Theory</i> ) .....	22
<b>BAB III. METODOLOGI KAJIAN</b> .....	<b>23</b>
3.1 Pendekatan Kajian .....	23
3.2 Data dan Sumber Data .....	23
3.3 Tahapan Pekerjaan .....	23
3.3.1 Tahapan Persiapan .....	23
3.3.2 Tahapan Analisis dan Penyusunan Peta .....	24
3.3.3 Tahapan Penyusunan .....	24
3.4 Metode Analisis .....	24
<b>BAB IV. Diskusi dan Pembahasan</b> .....	<b>25</b>
4.1 Gambaran Umum Kota Malang .....	25
4.2 Gambaran Umum Investasi di Kota Malang .....	37
4.2.1 Karakteristik Penduduk dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Malang .....	37



4.2.2	Karakteristik Perekonomian Kota Malang.....	39
4.3	Pemetaan Investasi di Kota Malang.....	41
4.3.1	Analisis LQ (Location Quotient).....	41
4.3.2	Analisis <i>Shift Share</i> .....	46
4.4	Pembahasan Investasi di Kota Malang.....	48
4.5	Pemetaan Investasi dan Tenaga Kerja .....	49
4.5.1	Pemetaan Investasi di Kota Malang .....	49
4.5.2	Sekilas indikator ketenagakerjaan Kota Malang.....	57
4.5.3	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama .....	59
4.5.4	Upah Minimum Kota Malang .....	60
BAB V.	Penutup .....	62
	Daftar Pustaka.....	1



## Daftar Tabel

<b>Tabel IV-1.</b> Rincian Administratif Kota Malang.....	33
<b>Tabel IV-2.</b> Curah Hujan Kota Malang Berdasarkan Tiga Titik Stasiun Pengamatan .....	35
<b>Tabel IV-3.</b> Ketinggian Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kota Malang .....	35
<b>Tabel IV-4.</b> Jumlah Penduduk Kota Malang.....	38
<b>Tabel IV-5.</b> Tabel persentase kontribusi lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang tahun 2015-2019 .....	40
<b>Tabel IV-6.</b> Perhitungan LQ Kota Malang 2016-2018.....	41
<b>Tabel IV-7.</b> Perhitungan Shift Share Kota Malang.....	46
<b>Tabel IV-8.</b> Investasi Kota Malang Tahun 2019 .....	48



## Daftar Bagan

<b>Bagan 2-1.</b> Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi.....	16
--	----



## Daftar Peta

Peta I-1. Peta Kota Malang .....	2
Peta IV-1. Peta Kota Malang .....	26
Peta IV-2. Peta Citra Kota Malang.....	27
Peta IV-3. Peta Citra Kecamatan Klojen .....	28
Peta IV-4. Peta Citra Kecamatan Klojen .....	29
Peta IV-5. Peta Citra Kecamatan Blimbing .....	30
Peta IV-6. Peta Citra Kecamatan Lowokwaru .....	31
Peta IV-7. Peta Citra Kecamatan Kedungkandang.....	32
Peta IV-8. Peta LQ Kota Malang Tahun 2016.....	43
Peta IV-9. Peta LQ Kota Malang Tahun 2017 .....	44
Peta IV-10. Peta LQ Kota Malang Tahun 2018 .....	45
Peta IV-11. Peta Potensi Investasi Kota Malang.....	51
Peta IV-12. Peta Potensi Investasi Kecamatan Blimbing .....	52
Peta IV-13. Peta Potensi Investasi Kecamatan Kedungkandang.....	53
Peta IV-14. Peta Potensi Investasi Kecamatan Klojen .....	54
Peta IV-15. Peta Potensi Investasi Kecamatan Lowokwaru .....	55
Peta IV-16. Peta Potensi Investasi Kecamatan Sukun.....	56

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan tujuan setiap bangsa yang dapat dimaknai sebagai sebuah proses dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan umat manusia (Todaro dan Smith, 2011). Secara lebih spesifik, pembangunan merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya (Abe, 1994). Saat ini, pembangunan di bidang ekonomi menjadi salah satu fokus di banyak negara termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi sendiri mempunyai arti sebagai sebuah proses meningkatnya pendapatan per kapita selama kurun waktu yang panjang dengan catatan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Meier, 1995) dalam (Kuncoro, 2010). Dalam hal penjabaran mengenai pembangunan tersebut, maka pertumbuhan ekonomi menjadi syarat dalam pembangunan ekonomi.

Memasuki era yang semakin kompetitif sebagaimana saat ini, strategi pengelolaan faktor-faktor produksi menjadi penting agar mampu menciptakan penawaran agregat yang selanjutnya dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh 2 ekonom bermazhab Keynesian, Roy F. Harrod (1939) dan Evsey D. Domar (1947) dimana salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi adalah investasi, yang didefinisikan sebagai perubahan stok modal. Modal sebagai salah satu faktor produksi mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kegiatan investasi oleh para investor (baik perusahaan maupun individu) akan sangat membantu perekonomian dalam menambah stok modal yang dibutuhkan. Modal-modal tersebut nantinya dapat menghasilkan barang dan jasa yang tentunya dapat dinikmati seluruh masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

Investasi juga merupakan suatu instrumen yang banyak disukai oleh berbagai negara termasuk Indonesia dalam meningkatkan pendapatan negara termasuk untuk menyerap lapangan kerja secara masif. Kategori investasi investasi secara langsung (pada sektor riil) berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua yakni berasal dari luar negeri atau biasa disebut dengan *foreign direct investment* dan investasi yang bersumber dari dalam negeri atau dikenal dengan sebutan *domestic direct investment*.

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya untuk menarik minat investasi baik yang bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri dan hal ini dapat dilihat dari berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia guna meningkatkan investasi di Indonesia (Bappenas, 2020). Berdasarkan perkembangan investasi pula, diketahui pula bahwa beberapa wilayah di Indonesia memiliki daya tarik investasi yang kuat sebagaimana Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur (BPKM, 2019).

Jawa Timur sendiri merupakan salah satu Daerah yang menarik bagi para investor karena memiliki berbagai infrastruktur seperti: ketersediaan lahan untuk investasi, kawasan industri, tenaga kerja yang relatif lebih murah hingga pangsa pasar yang relatif besar. Dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur, terdapat Kota Malang yang mulai menunjukkan pertumbuhan ekonominya secara signifikan sehingga Kota Malang menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur karena kontribusinya yang signifikan pula.

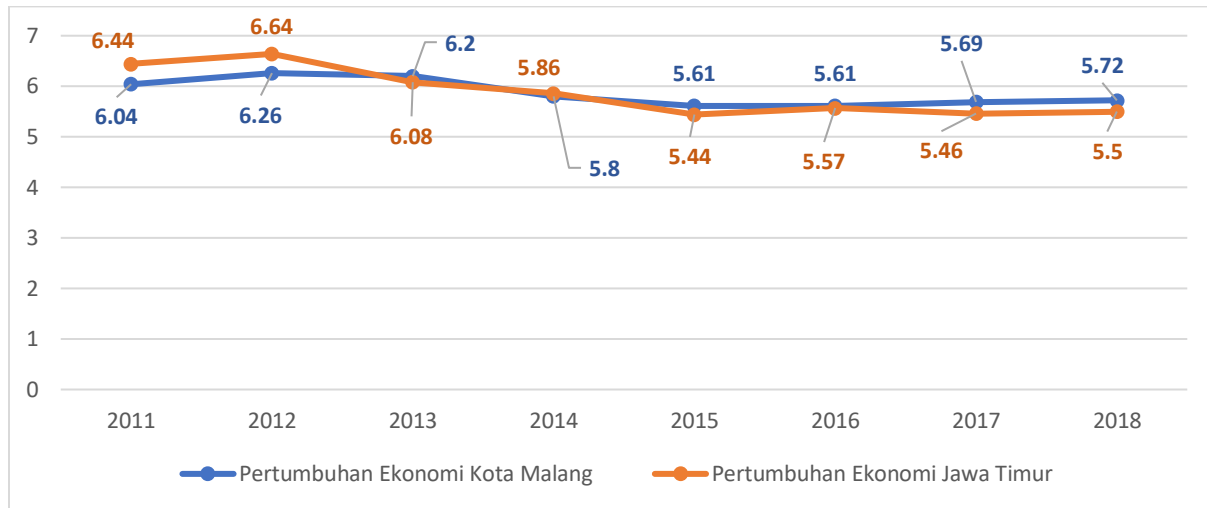


Peta I-1. Peta Kota Malang

Tingginya peran Kota Malang bagi Jawa Timur diketahui dari pertumbuhan ekonominya yang terus mengalami peningkatan, bahkan sejak tahun 2015 tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Malang melampaui pertumbuhan ekonomi rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur.



**Grafik I-1.** Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang & Provinsi Jawa Timur 2011-2018 (%)

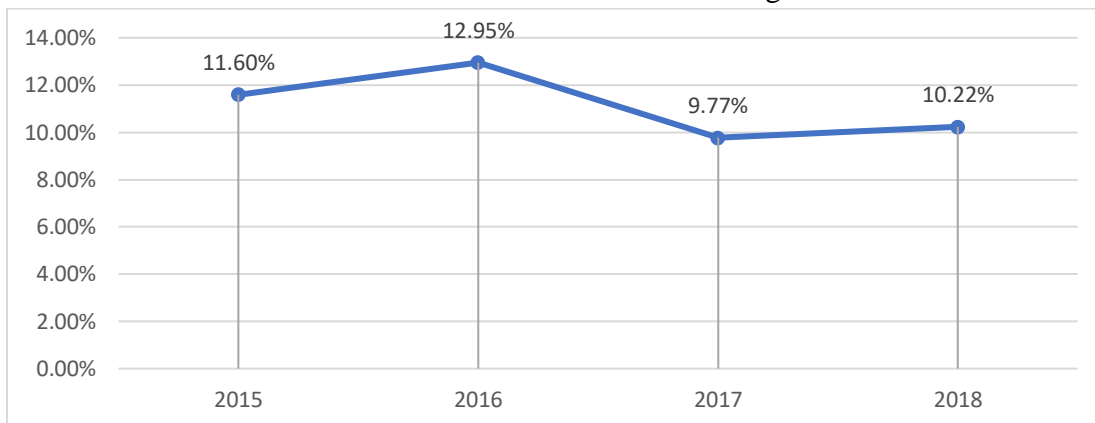


Sumber: Data diolah dari BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Melalui tingginya pertumbuhan ekonomi di Kota Malang yang terjadi akhir-akhir ini maka hal ini juga merupakan salah satu sinyal yang menunjukkan potensi untuk berinvestasi di Kota Malang. Pentingnya indikator pertumbuhan ekonomi bagi iklim investasi dapat dijelaskan melalui hasil kajian Sarwedi (2002), Awan, Khan, dan Uz Zaman (2011), Anna (2012), Insah (2013), Dewi dan Triaryati (2015) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap minat investor untuk menanamkan modalnya. Dan bagi Kota Malang, ketersediaan dan kemajuan di berbagai sektor telah mampu menarik banyak investor untuk berinvestasi di Kota Malang (Sutiaji, 2019).

Berkaitan dengan investasi yang ada di Kota Malang pula, dapat diketahui bagaimana perubahan (pertumbuhan) dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kota Malang. PMTB sendiri menunjukkan suatu kondisi terhadap penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi pada periode tertentu dimana penambahan barang modal dapat berupa pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri. Sedangkan pengurangan barang modal berkaitan dengan penjualan, transfer atau barter dan sewa beli barang modal bekas kepada pihak lain terkecuali disebabkan oleh bencana alam.

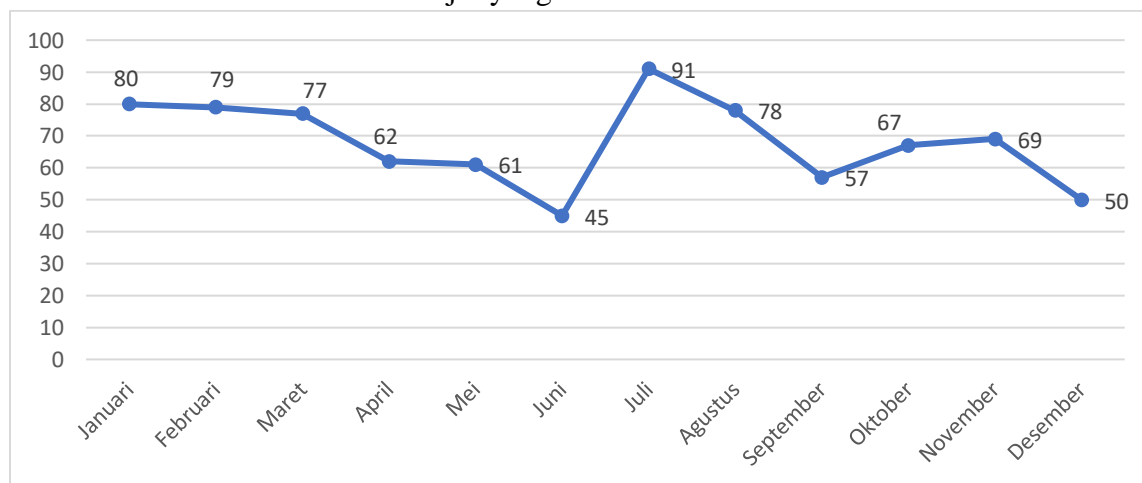
**Grafik I-2. Pertumbuhan PMTB Kota Malang 2014-2018**



Sumber: (BPS, 2019)

Selain itu, potensi perekonomian (investasi) Kota Malang juga tampak dari berbagai jenis ijin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal (DPMPTSP) dengan rata-rata 68 (enam puluh delapan) ijin yang terbit sejak bulan Januari hingga Desember 2019 dimana ijin ini terdiri dari perijinan di bidang pertanian, perdagangan, jasa konstruksi, transportasi dan sebagainya yang secara detail diketahui sebagaimana berikut.

**Grafik I-3. Jumlah Ijin yang diterbitkan oleh DPMPTSP 2019**



Sumber: Disnaker PMTPSP Kota Malang 2020

Dengan rata-rata jumlah ijin yang keluar sebanyak 68 (enam puluh) delapan ijin pada tahun 2019, maka hal ini turut menunjukkan keseriusan dalam membangun iklim investasi di Kota Malang dari sisi kemudahan investasi berupa perijinan.



Secara lebih mendalam, tingginya pertumbuhan ekonomi Kota Malang tidak dapat dipisahkan dari visi dan misi Kepala Daerah Kota Malang dimana saat ini, salah satu misi Kota Malang yang dijalankan yakni “mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan”. Melalui salah satu misi ini pula, berbagai kebijakan dalam rangka membuka “keran” investasi di Kota Malang menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Kota Malang untuk mengembangkan perekonomian di wilayah Kota Malang.

Dalam rangka pengembangan pintu investasi di Kota Malang, maka Pemerintah Daerah Kota Malang juga menjalankan amanah pemerintah pusat berupa PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan nama OSS (*Online Single Submission*) untuk kemudian ditindaklanjuti melalui berbagai program yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Malang.

Namun demikian, pengembangan investasi di Kota Malang tentu saja tidak dapat (boleh) berbenturan dengan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan salah satu contohnya berkaitan dengan Peraturan Kepala BPKP dan RPJMD Kota Malang, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Malang. Sehingga investasi yang ada di Kota Malang tetap sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengenai pengembangan-pengembangan wilayah di Indonesia.

Meninjau pada minat investasi yang ada pada Kota Malang dan untuk merealisasikannya dibutuhkan data yang akurat mengenai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di Kota Malang, maka Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) melakukan suatu kajian berupa “Pemetaan Investasi Kota Malang” tahun 2020 yang bekerjasama dengan Universitas Brawijaya guna mendapatkan informasi dan dapat menyebarluaskan hasil kajian ini dalam bentuk peta digital yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat luas.

## 1.2 Rumusan Kegiatan

Mengingat pentingnya informasi berkaitan dengan investasi yang ada di Kota Malang, maka melalui kajian ini disusun pula mengenai rumusan kajian yakni “Bagaimana Pemetaan Potensi investasi di Kota Malang?”



### 1.3 Tujuan Kegiatan

Meninjau rumusan yang telah tersusun, maka ujuan dari kegiatan Penyusunan Potensi Investasi adalah untuk menyediakan data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi serta menyusun peta potensi investasi Kota Malang dalam bentuk peta digital.

### 1.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi adalah tersusunnya peta potensi investasi Kota Malang sebagai salah satu sumber informasi bagi para calon investor.

### 1.5 Referensi Hukum Kegiatan

Sumber hukum pengerjaan kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kota Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 2) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Peraturan Kepala BKPM RI No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 5) Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6) Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### 1.6 Keluaran / *Output* Kegiatan

Keluaran dari kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kota Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Buku Laporan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kota Malang (fokus pada 1 sektor);



- 2) Peta Potensi Investasi Kota Malang dalam bentuk peta digital (fokus pada 1 sektor).

## BAB II. KERANGKA KAJIAN

### 2.1 Pertumbuhan *Ouput* dan Investasi

#### 2.1.1 Pertumbuhan Output

Sistem produksi nasional suatu wilayah terdiri dari tiga unsur pokok, diantaranya:

a. Sumber daya alam (faktor produksi tanah)

Sumber daya alam merupakan faktor pembatas (batas atas) dari pertumbuhan ekonomi. Selama sumber daya alam belum sepenuhnya dimanfaatkan maka yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumberdaya manusia (tenaga kerja) dan stok kapital. Namun, jika sumber daya alam telah dimanfaatkan sepenuhnya (dieksploisir) atau dengan kata lain batas atas daya dukung sumberdaya alam telah dicapai maka pertumbuhan ekonomi akan berhenti. Faktor kapital merupakan faktor yang aktif dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu akumulasi kapital sangat berperan dalam proses pertumbuhan ekonomi.

b. Sumber daya manusia (jumlah penduduk)

Pada proses pertumbuhan output, unsur sumber daya manusia dianggap memiliki peranan pasif artinya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja.

c. Stok kapital yang tersedia.

Akumulasi capital tidak dapat dilepaskan dari perluasan pasar yang merupakan tempat untuk mendistribusikan hasil produksi. Cakupan pasar memiliki pengaruh yang sangat luas bagi pemasaran hasil produksi. Maka pasar akan berpengaruh pada perolehan laba.

Menurut pandangan Keynes bahwa dalam pasar tenaga kerja, bahwa pengangguran merupakan wujud dalam perekonomian. Penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi. Hal tersebut disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang merupakan wujud dalam perekonomian.

Kritik selanjutnya Keynes berpendapat bahwa sistem pasar bebas tidak akan membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan menciptakan tingkat kesempatan kerja penuh. Sebaliknya Keynes berpendapat bahwa untuk menciptakan keadaan tenaga kerja penuh diperlukan intervensi pemerintah berupa regulasi yang diterapkan. Dalam mencapai tingkat kesempatan kerja penuh

diperlukan tiga hal, yaitu: (1) menstabilkan tingkat harga dan mencegah inflasi, (2) mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, dan (3) menjaga kestabilan sektor luar negeri (Sukirno, 2000).

Teori Keynes mengemukakan mengenai tingkat ekonomi dalam suatu negara ditentukan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi tersebut. Penentuan tingkat kegiatan suatu perekonomian menurut Keynes secara garis besar yaitu (Sukirno, 2013):

1. Peranan belanja agregat dalam menentukan kegiatan ekonomi.

Analisis Keynes lebih banyak memperhatikan aspek permintaan, yaitu dengan menganalisis mengenai peranan dari permintaan berbagai golongan masyarakat dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang akan dicapai dalam suatu perekonomian. Pada dasarnya analisis Keynes berpendapat bahwa tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan untuk membayar barang dan jasa yang diminta tersebut yang diwujudkan dalam perekonomian. Semakin besar permintaan efektif dalam perekonomian, maka semakin besar juga tingkat produksi yang akan dicapai oleh sektor-sektor. Keadaan ini dengan sendirinya akan menyebabkan pertambahan dalam tingkat kegiatan ekonomi, pertambahan tenaga kerja dan pertambahan penggunaan faktor-faktor produksi.

Analisis Keynes juga berasumsi bahwa jumlah dan kemampuan dari faktor-faktor produksi tidak akan mengalami perubahan. Maka, kegiatan ekonomi akan bertambah tinggi dan lebih banyak faktor-faktor produksi yang digunakan. Hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya jumlah pengangguran dan faktor-faktor produksi. Dengan demikian, tingkat penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian bergantung pada besarnya permintaan efektif yang tercipta dalam suatu perekonomian.

2. Komponen utama dari belanja agregat.

Pada analisis Keynes, menyatakan bahwa pengeluaran agregat dalam perekonomian meliputi pengeluaran pemerintah dan ekspor. Maka pengeluaran agregat dibedakan menjadi empat komponen yaitu: konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah dan ekspor. Dalam konteks ini, pemerintah bukan saja berfungsi untuk mengatur kegiatan perekonomian namun juga dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat. Di satu pihak pemerintah melalui pemungutan pajak akan mengurangi belanja agregat. Namun pajak tersebut akan dibelanjakan lagi oleh pemerintah dan langkah tersebut akan

meningkatkan pengeluaran agregat. Pemerintah seringkali membelanjakan dana yang melebihi penerimaan pajak. Langkah seperti ini akan meningkatkan keseluruhan pembelanjaan agregat.

Teori Keynes berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Menurut pandangan Keynes bahwa intervensi pemerintah diperlukan dengan menerapkan kebijakan fiskal untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Sun'an dan Astuti, 2008).

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan tingkat pembelian pemerintah, transfer dan struktur pajak. Kebijakan fiskal dapat dipahami sebagai upaya pemerintah dengan menaikkan atau menurunkan penerimaan dan atau pengeluaran negara untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan kebijakan fiskal tersebut untuk meningkatkan pendapatan nasional, peningkatan kesempatan kerja, penurunan laju inflasi, penurunan deficit neraca perdagangan dan penurunan deficit neraca pembayaran internasional (Ma'ruf dan Wihastuti, 2008).

Menurut Dumairy (1996) bahwa anggaran belanja merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat memengaruhi perekonomian melalui fungsi anggaran dalam alokasi, disytribusi dan stabilisasi. Maka dari itu pengeluaran pemerintah sangat penting guna melakukan pembiayaan yang dilakukan pemerintah guna keperluan administrasi dan kegiatan lainnya yang mendukung sistem pemerintah masing-masing.

Model makroekonomi Keynesian merupakan teori yang menjelaskan perekonomian yang berfluktuatif dalam jangka pendek dengan fokusnya pada sisi pengeluaran secara agregat. Identitas dasar Keynesian dapat diilustrasikan sebagai berikut:

$$PDB = C + I + G$$

dimana: C merupakan total konsumsi rumah tangga terhadap barang dan jasa; I merupakan investasi; dan G merupakan pengeluaran pemerintah.

### 2.1.2 Pengertian Investasi

Investasi merupakan komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan (Tendelilin, 2001) dalam (Herlianto, 2013).



Investasi juga dapat dimaknai sebagai pengorbanan konsumsi di masa sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa yang akan datang. Menurut Sharpe, Alexander, dan Bailey (2001) dalam Herlianto (2013), investasi adalah mengorbankan aset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan aset pada masa mendatang yang tentu saja dengan jumlah yang lebih besar. Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang/jasa dengan tujuan investasi, yakni untuk menambah stok atau memperbesar kapasitas produksi (Boediono, 2015). Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004), investasi adalah penambahan stok modal atau barang di suatu negara seperti bangunan peralatan produksi dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran yang dapat berupa anggaran, barang modal, peralatan modal, dan barang-barang inventaris yang digunakan untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa sehingga terjadi peningkatan *output*.

### 2.1.3 Teori Investasi Keynes

Dalam teori Keynes, keputusan apakah suatu investasi dilakukan atau tidak tergantung kepada perbandingan antara besarnya keuntungan yang diharapkan (yang dinyatakan dalam persentase per satuan waktu) di satu pihak dan biaya penggunaan dana atau tingkat bunga di lain pihak (Boediono, 2015). Sebagai contoh, perusahaan membeli truk seharga Rp 1 juta yang bisa menghasilkan keuntungan kotor (setelah depresiasi diperhitungkan) Rp 500 ribu setiap tahunnya (atau 50% per tahun) sampai 10 tahun. Pada akhir tahun kesepuluh, uang yang ditanamkan sudah kembali dan truk secara ekonomis “habis”. Tetapi, selama 10 tahun perusahaan tersebut menerima Rp 500 ribu setiap tahunnya. Namun, perlu dicatat bahwa penghasilan sebesar Rp 500 ribu tersebut pada waktu si pengusaha memutuskan melakukan pembelian truk hanyalah merupakan hasil-hasil perhitungan di atas kertas. Dalam kenyataannya nanti, mungkin kalkulasi pengusaha tersebut meleset, misalnya karena truk tersebut ternyata tidak bisa memperoleh muatan secara penuh seperti yang diharapkan semula, atau ternyata ongkos eksploitasinya lebih tinggi/rendah daripada yang dikalkulasi semula. Dengan demikian, kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Tetapi, pengusaha tersebut harus tetap membuat taksiran sebaik mungkin atas dasar pengalaman dan pengetahuannya sendiri atau orang lain (konsultan misalnya) mengenai berapa besar keuntungan yang diharapkan, dan kemudian menentukan apakah investasi (pembelian truk) tersebut dilaksanakan atau tidak. Seandainya tingkat bunga yang berlaku di pasar uang adalah 2% setiap bulan (24% per tahun),

maka investasi pembelian truk tersebut masih menguntungkan, karena keuntungan (kotor) yang diharapkan adalah 50% per tahun, jadi melebihi ongkos penggunaan dana. Tetapi, jika tingkat bunga yang berlaku di pasar uang adalah 5% per bulan (60% per tahun), maka investasi pembelian truk tersebut tidaklah menguntungkan sehingga pengusaha tersebut harus mencari investasi lain yang lebih menguntungkan.

Perhitungan semacam ini berlaku bagi mereka yang meminjam maupun yang memiliki dana sendiri. Sebabnya adalah jika seandainya tingkat bunga di pasar uang adalah 5% per bulan, maka pengusaha yang memiliki dana sendiri akan lebih beruntung untuk meminjamkan dananya di pasar uang dan memperoleh penghasilan bunga sebesar 5% per bulan daripada menggunakannya untuk membeli truk tersebut. Dalam teori Keynes, tingkat keuntungan yang diharapkan ini disebut dengan istilah *Marginal Efficiency of Capital* (MEC). Secara ringkas, bila keuntungan yang diharapkan (MEC) lebih besar daripada tingkat bunga di pasar uang, maka investasi dilaksanakan. Bila MEC lebih kecil daripada tingkat bunga di pasar uang, maka investasi tidak dilaksanakan. Bila MEC sama dengan tingkat bunga di pasar uang, maka investasi boleh dilaksanakan dan boleh tidak. Dari uraian diatas diketahui bahwa tingkat pengeluaran investasi yang diinginkan oleh para investor ditentukan oleh dua hal, yaitu tingkat bunga yang berlaku di pasar uang dan *Marginal Efficiency of Capital*. Perilaku makro dari para investor ini biasanya diringkas dalam bentuk satu fungsi yang disebut fungsi *Marginal Efficiency of Capital* atau fungsi investasi. Fungsi MEC atau fungsi investasi ini menunjukkan hubungan antara tingkat bunga yang berlaku dengan tingkat pengeluaran investasi yang diinginkan oleh para investor. Cara menurunkan fungsi investasi tersebut adalah sebagai berikut :

Misalnya, pada suatu waktu tersedia di dalam masyarakat 5 proyek investasi yang mungkin untuk dilaksanakan oleh para investor, masing-masing dengan MEC sebagai berikut :

**Tabel II-1.** Contoh Keputusan Investasi (data hipotesis)

<b>Proyek</b>	<b>Nilai Investasi (Rp Juta)</b>	<b>MEC (% per tahun)</b>
A	100	50
B	200	40
C	50	35

Proyek	Nilai Investasi (Rp Juta)	MEC (% per tahun)
D	150	20
E	75	15

Sumber : Boediono, 2015

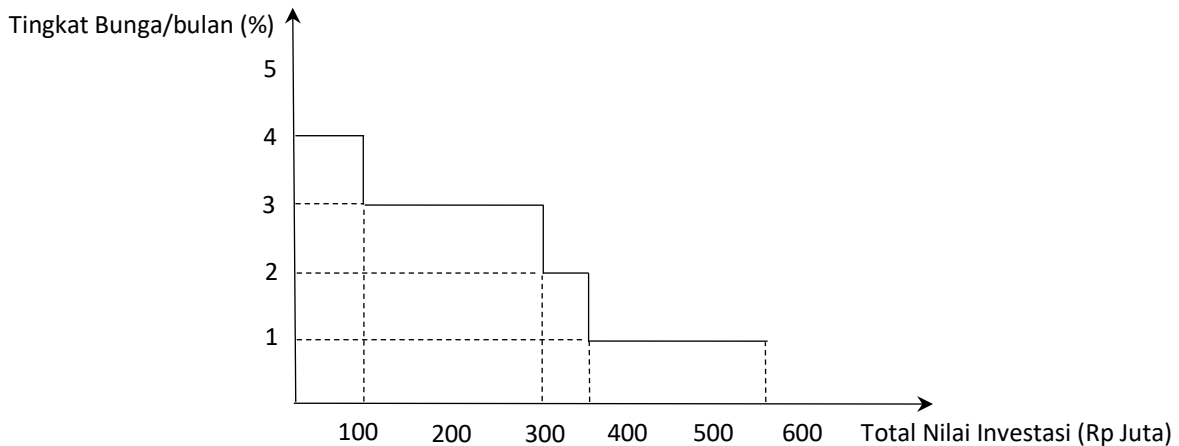
Seandainya tingkat bunga yang berlaku adalah 4% per bulan (48% per tahun), maka proyek investasi yang menguntungkan hanyalah proyek A dengan nilai investasi Rp 100 juta, sebab MEC pada proyek A melebihi tingkat bunga yang berlaku. Jika tingkat bunga yang berlaku bukan 4% per bulan melainkan 3% per bulan (36% per tahun), maka proyek investasi yang menguntungkan adalah proyek A dan proyek B dengan total nilai investasi Rp 300 juta, sebab MEC pada proyek A dan proyek B melebihi tingkat bunga yang berlaku. Demikian seterusnya jika tingkat bunga yang berlaku misalnya 2% atau 1%, maka dapat ditabulasikan sebagai berikut:

**Tabel II-2.** Hubungan Tingkat Bunga dan Nilai Investasi (data hipotesis)

Tingkat Bunga/bulan (%)	Total Nilai Investasi (Rp Juta)
5	0
4	100
3	300
2	350
1	575

Sumber : Boediono, 2015

Berdasarkan Tabel 3-1, maka dapat dibentuk kurva yang menghubungkan antara tingkat bunga yang berlaku dengan total nilai investasi dimana kurva ini tidak lain adalah kurva fungsi investasi (fungsi MEC).



Beberapa hal yang perlu digaris bawahi mengenai fungsi investasi. *Pertama*, fungsi tersebut mempunyai slope negatif, artinya semakin rendah tingkat bunga maka semakin besar tingkat pengeluaran investasi yang diinginkan. *Kedua*, dalam kenyataannya fungsi semacam itu sangat sulit untuk diperoleh sebab posisinya sangat labil (mudah berubah dalam jangka waktu yang singkat). Kelabilan fungsi investasi ini dapat dipahami bahwa posisinya sangat tergantung pada nilai-nilai MEC dari proyek yang ada dan bahwa MEC adalah keuntungan yang diharapkan investor. Oleh karena didasarkan atas harapan masa depan atau ekspektasi (atas dasar subyektif), maka MEC suatu proyek bisa saja berubah dari hari ke hari dan peka terhadap perubahan kondisi sosio-ekonomis-politis negara. Misalnya adanya gejolak politik di suatu daerah, desas-desus akan adanya (misalnya) devaluasi atau pembatasan impor, maka akan langsung mengubah penilaian subyektif investor terhadap suatu proyek. Karena begitu banyaknya faktor yang bisa mempengaruhi MEC, maka posisi fungsi investasipun akan sangat mudah berubah. *Ketiga*, adalah hubungan antara teori investasi Keynes tersebut dengan kenyataan, khususnya mengenai masalah tersedianya dana investasi. Teori Keynes didasarkan atas anggapan bahwa pada tingkat bunga yang berlaku, setiap investor bisa memperoleh dana berapapun yang ia perlukan untuk membiayai proyek-proyek yang ia anggap menguntungkan untuk dilaksanakan sedangkan yang membatasi jumlah yang ingin ia investasikan hanyalah penilaiannya mengenai MEC proyek-proyek yang terbuka baginya. Dalam kenyataannya seringkali dijumpai keadaan yang sebaliknya, yaitu begitu banyaknya proyek yang menguntungkan (MEC tinggi) tetapi sulit untuk memperoleh dana untuk membiayai semuanya karena kesulitan memperoleh kredit bank.

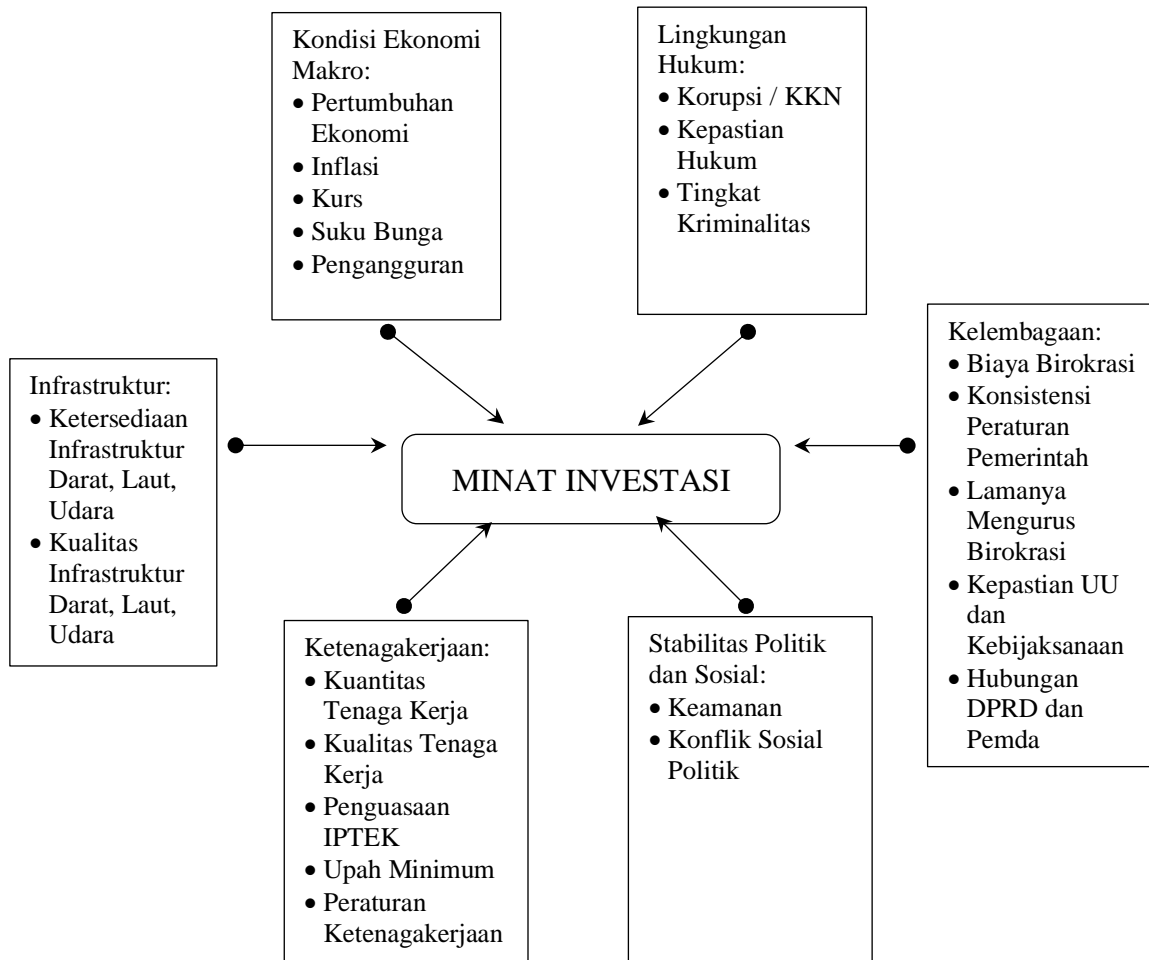


Menurut pendapat Keynes dalam Hanim dan Ragimun (2010), faktor yang mempengaruhi besarnya investasi tergantung pada tingkat bunga, keadaan ekonomi masa kini, ramalan perkembangan di masa yang akan datang, luasnya perkembangan teknologi yang berlaku, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya serta keuntungan yang diperoleh perusahaan. Apabila tingkat kegiatan ekonomi saat ini dirasa mengalami kemajuan dan pada masa yang akan datang diprediksi bahwa perekonomian akan tumbuh cepat maka walaupun tingkat bunga yang berlaku di pasar uang tinggi, para pengusaha tetap akan melakukan banyak investasi. Dengan kata lain, *Marginal Efficiency of Capital* (MEC) yang diharapkan masih lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku (Sukirno, 1994). Sebaliknya, meskipun tingkat bunga yang berlaku di pasar uang rendah, investasi tidak akan banyak dilakukan apabila barang-barang modal dalam suatu perekonomian digunakan pada tingkat yang lebih rendah dari kemampuan maksimal.

#### 2.1.1 Iklim Investasi Wilayah

Kemajuan perekonomian suatu wilayah tidak bisa lepas dari pemanfaatan sumber daya termasuk aset yang dimiliki pemerintah daerah maupun swasta. Dalam memanfaatkan sumber daya menjadi kekuatan ekonomi, maka kegiatan investasi menjadi salah satu “mesin penggerak” (Hanim dan Ragimun, 2010). Bagan 2-1 menggambarkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi minat investasi.

**Bagan 2-1.** Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi



Sumber : Hanim dan Ragimun, 2010

Menurut Shiddiq (2007) faktor terpenting dari aspek non ekonomi yang mempengaruhi investasi adalah keamanan dan stabilitas masyarakat, moralitas birokrat dan pengusaha, serta sistem administrasi birokrasi yang sederhana, cepat, dan profesional. Beberapa hal yang menjadi kendala utama pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya meningkatkan investasi antara lain:

1. Stabilitas keamanan dan politik suatu wilayah. Potensi banyaknya kerusuhan yang muncul akibat instabilitas politik, kecemburuan sosial antar wilayah maupun ambisi pribadi/golongan dapat melemahkan daya tarik investasi di suatu wilayah.

2. Tidak adanya kepastian hukum. Hal ini menyebabkan investor enggan menanamkan modalnya di suatu wilayah.
3. Perbedaan *Purchasing Power* antar wilayah. Kebanyakan investor memilih berinvestasi pada wilayah yang pertumbuhan pasarnya tinggi dan biaya produksi serta tenaga kerja yang relatif murah.

Disamping itu masih banyak faktor lain yang menjadi kendala dimana setiap faktor mempunyai keterkaitan yang sangat kompleks sehingga menyebabkan investasi terkadang sulit untuk masuk di suatu wilayah (Tambunan, 2006).

### 2.1.2 Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Teori Keynes)

Teori ini mencoba menjelaskan bagaimana investasi dapat meningkatkan *output* suatu negara melalui *multiplier effect* (efek pengganda), yakni sebuah bilangan yang menunjukkan seberapa besar *output* akan naik atau turun ketika terjadi kenaikan atau penurunan permintaan agregat pada persamaan identitas pendapatan nasional “ $Y = C + I + G + NX$ ” (Mankiw, 2016). Munculnya efek pengganda ini adalah akibat dari proses belanja suatu barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus sehingga membentuk mata rantai konsumsi dan pendapatan yang berlipat ganda. Proses itu bermula ketika terdapat pengeluaran investasi sebesar  $\Delta I$ , yang menunjukkan bahwa pendapatan juga akan meningkat sebesar  $\Delta I$ . Kenaikan pendapatan ini akan meningkatkan konsumsi sebesar  $MPC \times \Delta I$  dimana MPC adalah kecenderungan mengonsumsi marjinal. Kenaikan konsumsi ini selanjutnya meningkatkan pengeluaran dan pendapatan. Kenaikan pendapatan yang kedua sebesar  $MPC \times \Delta I$  kemudian meningkatkan konsumsi menjadi sebesar  $MPC \times (MPC \times \Delta I)$  yang sekali lagi meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dan seterusnya. Umpan balik dari konsumsi ke pendapatan ke konsumsi ini terus menerus terjadi sehingga pengaruh totalnya terhadap *output* atau pendapatan dapat dihitung secara matematis menggunakan konsep *infinite geometric series* (seri geometri tak hingga) sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Perubahan Awal dalam Investasi} &= \Delta I \\ \text{Perubahan Pertama dalam Konsumsi} &= MPC \times \Delta I \\ \text{Perubahan Kedua dalam Konsumsi} &= MPC^2 \times \Delta I \\ \text{Perubahan Ketiga dalam Konsumsi} &= MPC^3 \times \Delta I \\ &= \cdot \\ &= \cdot \end{aligned}$$

$$\Delta Y = (1 + MPC + MPC^2 + MPC^3 + \dots) \Delta I \quad (1)$$

Sehingga pengganda investasi adalah

$$\Delta Y/\Delta I = 1 + MPC + MPC^2 + MPC^3 + \dots \quad (2)$$

Persamaan (2) merupakan seri geometri tak hingga (*infinite geometric series*) sehingga dengan perhitungan secara aljabar menghasilkan persamaan baru sebagai berikut (Blanchard, 2017).

$$\Delta Y/\Delta I = 1/(1 - MPC) \quad (3)$$

Misalnya, jika kecenderungan mengkonsumsi marjinal adalah 0,6 maka penggandanya adalah:

$$\begin{aligned} \Delta Y/\Delta I &= 1 + 0,6 + 0,6^2 + 0,6^3 + \dots \\ &= 1/(1 - 0,6) \\ &= 2,5 \end{aligned}$$

Dalam hal ini, kenaikan investasi sebesar Rp 1 Milyar maka akan meningkatkan *output* atau pendapatan sebesar Rp 2,5 Milyar.

### 2.1.3 Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Teori Harrod-Domar)

Teori Harrod-Domar merupakan pengembangan dari teori Keynes. Analisa Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak mengungkapkan masalah-masalah ekonomi dalam jangka panjang sedangkan teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Menurut Arsyad (2016), teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dengan mantap (*steady growth*). Menurut teori Harrod-Domar, pembentukan modal merupakan faktor penting yang dapat menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal



dapat diperoleh melalui proses akumulasi tabungan. Teori Harrod-Domar mempunyai beberapa asumsi yakni:

1. Perekonomian dalam pengerjaan penuh (*full employment*) dan faktor-faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh (*full utilization*).
2. Perekonomian terdiri dari dua sektor: sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
3. Besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional.
4. Kecenderungan menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-*output* (*capital-output ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal-*output* (*incremental capital-output ratio = ICOR*).

Sehingga inti teori Harrod-Domar yakni bahwa perekonomian dapat menyisihkan sejumlah proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk mengganti barang-barang modal (gedung, peralatan, material, dan sebagainya) yang telah rusak. Namun demikian, untuk dapat meningkatkan laju perekonomian, diperlukan pula investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Teori ini memandang bahwa ada hubungan ekonomis antara besarnya stok modal ( $K$ ) dan tingkat *output* total ( $Y$ ), misalnya jika 3 rupiah modal diperlukan untuk menghasilkan (kenaikan) *output* total sebesar 1 rupiah, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (*investasi baru*) akan mengakibatkan kenaikan *output* total sesuai dengan rasio modal-*output* tersebut.

Hubungan tersebut dikenal dengan istilah rasio modal-*output* (*capital-output ratio = COR*). Jika terdapat hubungan yang menyatakan bahwa 3 rupiah modal akan menghasilkan *output* sebesar 1 rupiah, maka dapat dikatakan bahwa rasio modal-*output*nya adalah 3 berbanding 1. Oleh karena itu, konsep ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan antara investasi yang ditanamkan dengan pendapatan tahunan yang dihasilkan dari investasi tersebut. Jika menetapkan  $COR=k$ , kemudian rasio kecenderungan menabung ( $MPS$ )= $s$  dan investasi ditentukan oleh tingkat tabungan, maka dapat disusun model pertumbuhan ekonomi yang sederhana, sebagai berikut:

Tabungan ( $S$ ) merupakan suatu proporsi ( $s$ ) dari *output* total ( $Y$ ), oleh karenanya mempunyai persamaan yang sederhana:

$$S = s.Y \quad (4)$$

Investasi ( $I$ ) dapat didefinisikan sebagai perubahan stok modal dan dilambangkan dengan  $\Delta K$ , maka:

$$I = \Delta K \quad (5)$$

Namun, karena stok modal ( $K$ ) mempunyai hubungan langsung dengan *output* total ( $Y$ ) seperti yang ditunjukkan oleh COR atau  $k$ , maka:

$$K / Y = k \text{ atau } \Delta K / \Delta Y = k \text{ atau } \Delta K = k \cdot \Delta Y \quad (6)$$

Akhirnya, karena tabungan total ( $S$ ) harus sama dengan investasi total ( $I$ ), maka:

$$S = I \quad (7)$$

Namun, dari persamaan (4) diatas dapat diketahui bahwa  $S = s \cdot Y$  dan dari persamaan (5) dan (6) dapat diketahui bahwa  $I = \Delta K = k \cdot \Delta Y$ . Oleh karena itu maka:

$$S = s \cdot Y = k \cdot \Delta Y = \Delta K = I \text{ atau } s \cdot Y = k \cdot \Delta Y \quad (8)$$

dan akhirnya diperoleh :

$$\Delta Y / Y = s / k \quad (9)$$

$\Delta Y / Y$  pada persamaan (9) menunjukkan tingkat pertumbuhan *output* (persentase perubahan *output*).

Persamaan (9) merupakan versi sederhana dari persamaan Harrod-Domar, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan *output* ( $\Delta Y / Y$ ) ditentukan secara simultan oleh rasio tabungan ( $s$ ) dan rasio modal-*output* ( $COR=k$ ). Secara lebih spesifik, persamaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan *output* berbanding lurus dengan rasio tabungan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat tabungan dan kemudian tabungan tersebut diinvestasikan, maka semakin tinggi pula tingkat *output* yang dihasilkan. Sedangkan hubungan antara rasio modal-*output* ( $COR$ ) dan tingkat pertumbuhan *output* adalah negatif. Artinya, semakin besar rasio modal-*output* ( $COR$ ) semakin rendah tingkat pertumbuhan *output*.

Logika ekonomi yang terkandung dalam persamaan (9) sangat sederhana. Jika ingin tumbuh dengan pesat, maka perekonomian harus menabung dan menginvestasikan sejumlah proporsi tertentu dari *output* totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian diinvestasikan, maka semakin cepat pula perekonomian tersebut akan tumbuh. Tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi yang nyata sebenarnya tergantung pada produktivitas dari investasi. Yang dimaksud dengan produktivitas investasi adalah banyaknya *output* yang dihasilkan dari satu unit investasi. Sebagai contoh, perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi menurut teori Harrod-Domar dapat digambarkan seperti di bawah ini. Misalkan rasio modal-*output* ( $COR$  atau  $k$ ) dari suatu negara adalah 3 dan rasio tabungan adalah 6% dari *output* total. Dengan menggunakan persamaan (9), maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi negara tersebut adalah sebesar 2% per tahun.

$$\Delta Y / Y = s / k = 6\% / 3 = 2\%$$

Kemudian, jika tingkat tabungan negara tersebut meningkat dari 6% menjadi 15%, maka pertumbuhan ekonomi negara akan bergerak naik dari 2% menjadi 5% per tahun.

$$\Delta Y/Y = s/k = 15\%/3 = 5\%$$

#### 2.1.4 Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Teori Solow-Swan)

Menurut teori Solow-Swan ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Berdasarkan penelitiannya, Solow (1956) menyatakan bahwa peran dari kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi sangat dominan. Temuan Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang mencapai 2,75% per tahun pada periode 1909 sampai 1949, lebih dari setengahnya (1,5%) merupakan sumbangan dari kemajuan teknologi, sedangkan sisanya disebabkan oleh penambahan jumlah penggunaan faktor produksi. Pandangan teori ini didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis ekonomi klasik yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan tingkat pemanfaatan penuh (*full utilization*) dari faktor-faktor produksinya. Dengan kata lain, perekonomian akan terus berkembang dan semuanya itu tergantung pada penambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi.

Selanjutnya, menurut teori ini rasio modal-*output* (*capital-output ratio*) dapat berubah-ubah, tidak seperti teori Harrod-Domar yang mengasumsikan konstan. Dengan kata lain, untuk menghasilkan sejumlah *output* tertentu, dapat digunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda. Jika lebih banyak modal yang digunakan, tenaga kerja yang dibutuhkan akan lebih sedikit begitu pula sebaliknya. Dengan adanya fleksibilitas ini, suatu perekonomian mempunyai kebebasan dalam menentukan kombinasi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat *output* tertentu. Teori ini dapat disajikan ke dalam bentuk fungsi produksi Cobb-Douglass, dimana *output* merupakan fungsi dari tenaga kerja dan modal. Sedangkan tingkat kemajuan teknologi merupakan variabel eksogen. Asumsi yang digunakan dalam model Solow-Swan adalah skala pengembalian konstan (*constant return to scale*), substitusi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) bersifat sempurna. Fungsi produksi Cobb-Douglass dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Q_t = T_t K_t^a L_t^b \quad (10)$$

dimana:

- $Q_t$         adalah tingkat produksi pada tahun t  
 $T_t$         adalah tingkat teknologi pada tahun t

- $K_t$  adalah jumlah stok barang modal pada tahun  $t$   
 $L_t$  adalah jumlah tenaga kerja pada tahun  $t$   
 $a$  adalah pertambahan *output* yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal  
 $b$  adalah pertambahan *output* yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja

Nilai  $T_t$ ,  $a$  dan  $b$  dapat diestimasi secara empiris. Tetapi pada umumnya nilai  $a$  dan  $b$  ditentukan saja besarnya dengan menganggap bahwa  $a+b=1$  (asumsi *constanst return to scale* = CRTS), yang berarti bahwa  $a$  dan  $b$  nilainya adalah sama dengan produktivitas batas dari masing-masing faktor produksi tersebut. Dengan kata lain, nilai  $a$  dan  $b$  ditentukan dengan melihat peranan tenaga kerja dan modal dalam menciptakan *output*.

### 2.1.5 Teori Kutub Pertumbuhan (*The Growth Pole Theory*)

Menurut Kuznets (1955), faktor penentu pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan riil per kapita dan distribusi angkatan kerja berdasarkan sektor kegiatan produksi yang merata. Teori kutub pertumbuhan cukup sesuai untuk membantu menganalisa pengembangan investasi suatu wilayah atau tempat dimana digunakan untuk konsentrasi aktivitas penduduk (Sinarasri, Hardiwinoto, dan Fathurrohman, 2014). Kota sebagai pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan, simpul distribusi, pusat pemukiman, atau daerah nodal. Daerah di luar pusat konsentrasi disebut dengan daerah *hinterland*, daerah pertanian, atau daerah pedesaan (Tarigan, 2004). Tarigan (2004) menjelaskan bahwa terjadi interaksi antara kota dengan di sekitarnya, yakni:

1. Hubungan generatif, yaitu hubungan yang saling menguntungkan atau saling mengembangkan antara kota dengan daerah sekitarnya.
2. Hubungan parasitif, yaitu hubungan antara kota dan daerah sekitarnya tidak banyak membantu, bahkan bisa melemahkan pertumbuhan daerah sekitarnya.
3. *Enclave*: yaitu kota seakan-akan terpisah sama sekali dengan daerah sekitarnya.

Daerah pusat pertumbuhan memiliki 4 ciri, yakni:

1. Adanya hubungan antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi.
2. Ada efek pengganda (*multiplier effect*).
3. Adanya konsentrasi geografis.
4. Kemampuan mendorong pertumbuhan daerah di belakangnya.

## BAB III. METODOLOGI KAJIAN

### 3.1 Pendekatan Kajian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kuantitatif, yaitu suatu cara atau teknik untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis data kuantitatif sehingga dapat memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Secara umum, penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui kondisi investasi dan perekonomian Kota Malang secara lebih detail.

### 3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan Pemetaan Investasi Kota Malang berasal dari data sekunder yang diterbitkan secara resmi oleh instansi pemerintah. Kebutuhan utama data ini berasal dari publikasi BPS Kota Malang, Kota Malang Dalam Angka dan publikasi lainnya yang sekiranya terkait dengan kegiatan analisa. Selanjutnya, untuk mendukung dan mendapatkan gambaran secara lebih detail, data juga dapat berasal dari beberapa dokumen perencanaan Kota Malang seperti:

- a. RTRW Kota Malang 2010 -2030;
- b. Hasil Penelitian yang dimiliki oleh Pemkot Malang; dan
- c. Data resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagaimana BPS, BI dan sebagainya.

### 3.3 Tahapan Pekerjaan

Kegiatan ini diselenggarakan secara kontraktual dimana secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut.

#### 3.3.1 Tahapan Persiapan

Kegiatan persiapan bertujuan membuat persiapan khusus yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan, termasuk melakukan koordinasi dalam menyusun jadwal dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang efektif, sehingga tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan. Lingkup kegiatannya meliputi:

- a) Pembuatan *mapping* sumber informasi dan perolehan data;
- b) Pencarian data *shape file* (shp) Kota Malang dan bidang ekonomi maupun investasi

### 3.3.2 Tahapan Analisis dan Penyusunan Peta

Kegiatan penyusunan peta bertujuan mengumpulkan data dan/atau *file* berkaitan dengan investasi dan potensinya di Kota Malang. Lingkup kegiatannya meliputi:

- a) Pembuatan *mapping* kondisi fisik, sosial, ekonomi, karakteristik wilayah, dan lain-lain yang diperlukan sebagai gambaran umum;
- b) Penghitungan berdasarkan Analisis *Location Quotient* (LQ).

### 3.3.3 Tahapan Penyusunan

Data hasil analisis disajikan dan disusun secara sistematis, kemudian dilakukan pengolahan dan analisis untuk kemudian dilakukan interpretasi. Lingkup kegiatannya antara lain meliputi;

- a) Menyajikan data dan informasi potensi ekonomi Kota Malang berdasarkan analisis LQ;
- b) Menyajikan data dan informasi peta potensi ekonomi Kota Malang;

## 3.4 Metode Analisis

Metode LQ ditunjukkan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan yang diakomodir dari Miller & Wright (1991), Isserman (1997), dan Ron Hood (1998). LQ dapat menjadi alat pengembang ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Teknik LQ ini secara umum digunakan sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan.

Teori ekonomi basis mengkategorikan kegiatan ekonomi menjadi dua sektor yakni basis dan non basis dimana basis diterjemahkan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat setempat (barang dan jasa) yang tujuannya lebih berorientasi kepada keluar wilayah setempat. Sedangkan non basis merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dimana hasilnya (barang dan jasa) lebih banyak digunakan oleh masyarakat setempat. Selain itu, dengan menggunakan Teknik LQ juga akan teridentifikasi leading sektor ekonomi pada suatu wilayah.

Di dalam perkembangannya, LQ tidak lagi digunakan sebatas pada hal tersebut saja namun telah meluas yang digunakan untuk menentukan sebaran komoditas atau untuk mengidentifikasi suatu wilayah berdasarkan potensinya. Secara umum, LQ dihitung berdasarkan persamaan berikut.

$$LQ = \frac{p_i/p_t}{P_i/P_t}$$

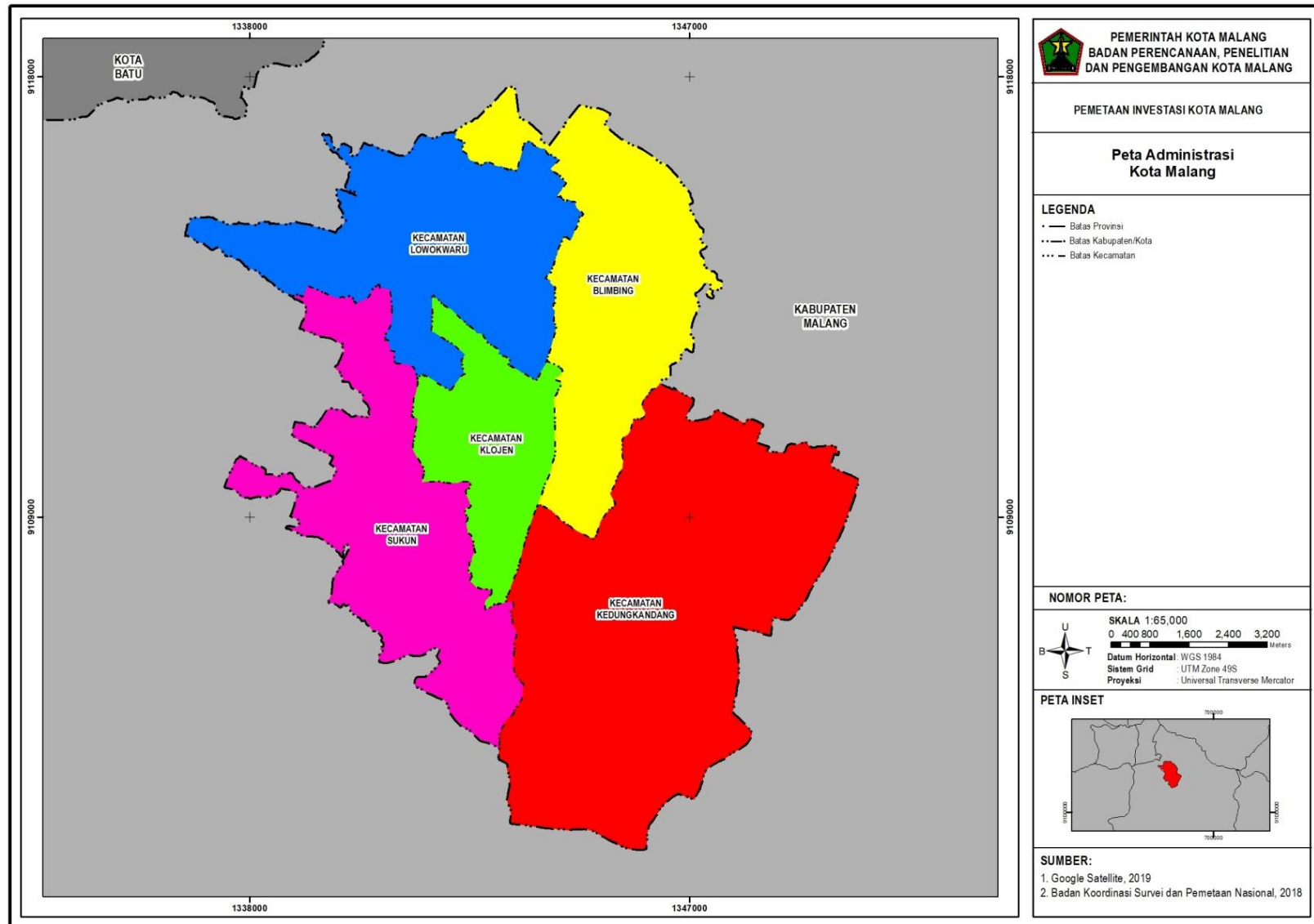


## BAB IV. Diskusi dan Pembahasan

### 4.1 Gambaran Umum Kota Malang

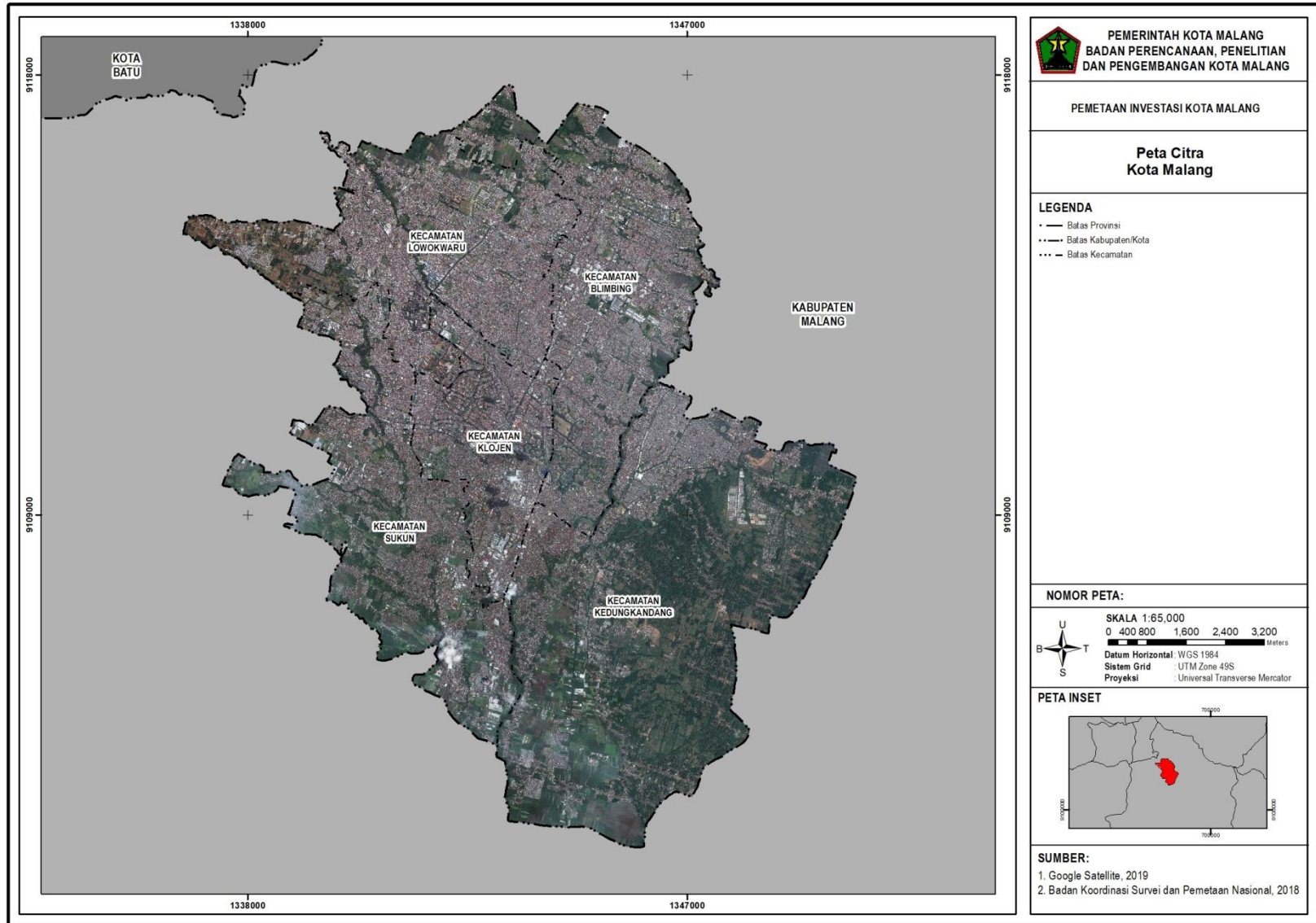
Kota Malang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur. Kota ini terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya yang merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur. Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan air laut dan memiliki posisi wilayah di tengah Kabupaten Malang. Karena hal tersebut, Kota Malang menjadi salah satu kota tujuan wisata karena memiliki potensi alam dan iklim yang dimiliki. Berikut merupakan batas administrasi Kota Malang:

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

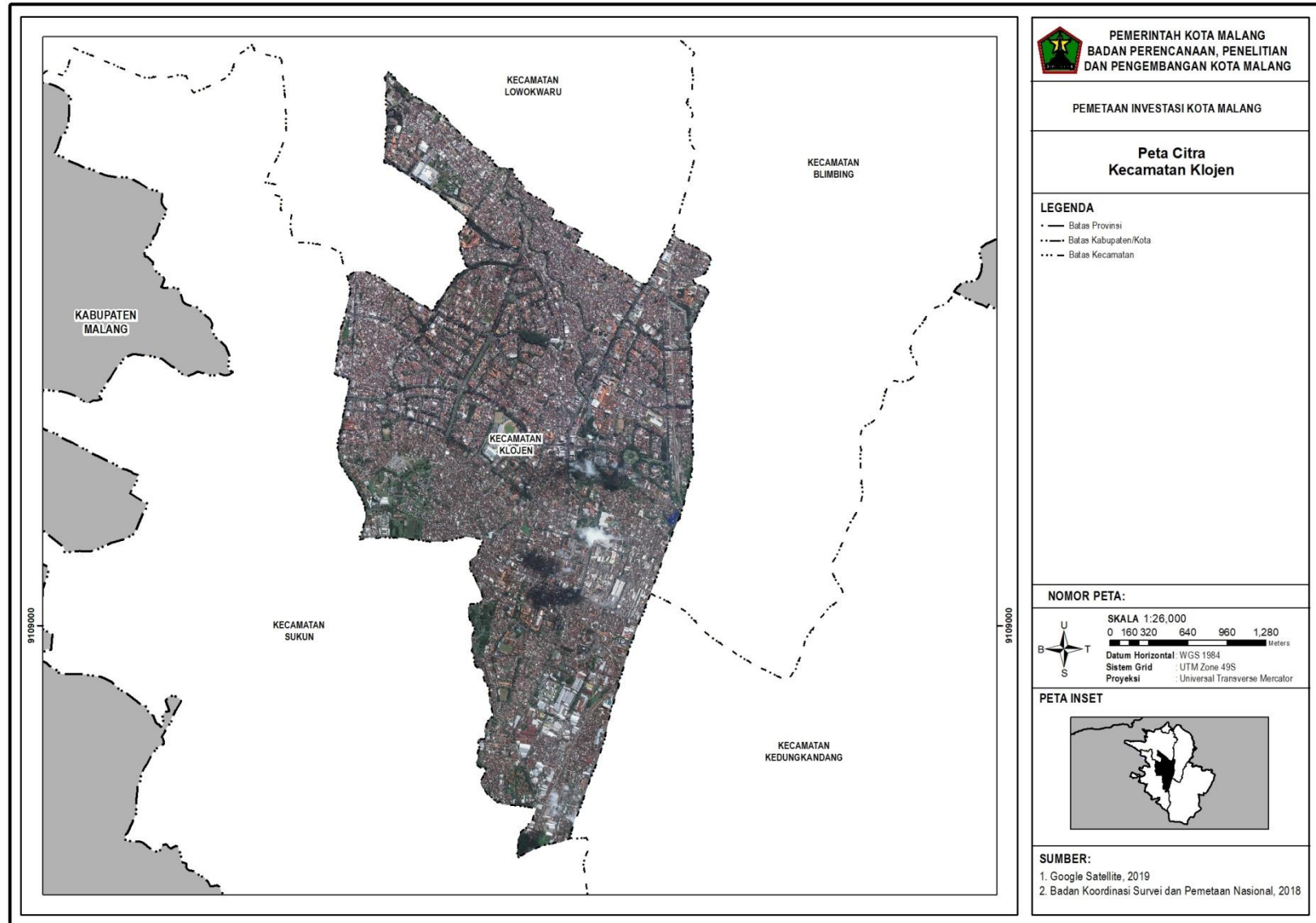


Peta IV-1. Peta Kota Malang

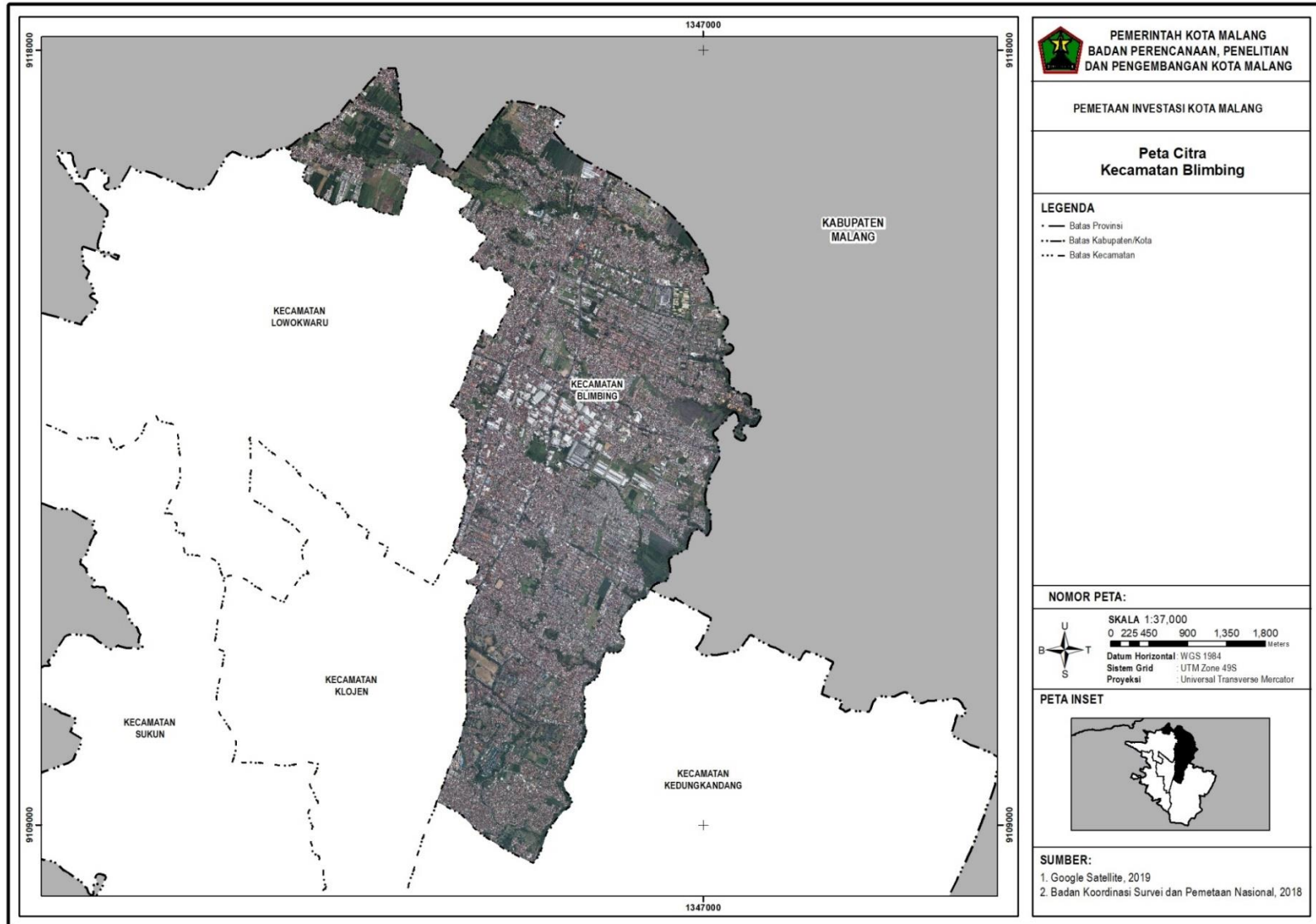




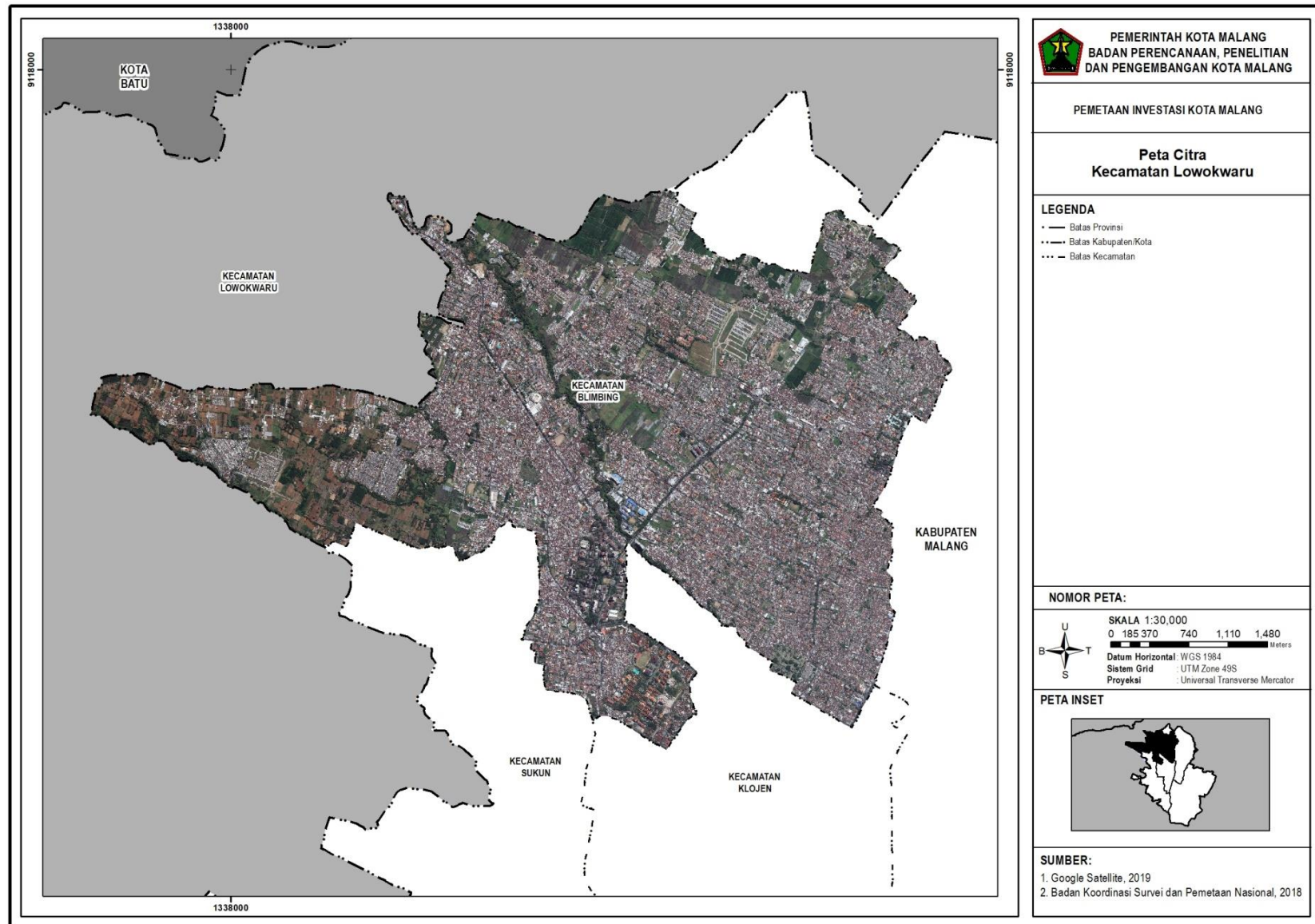
Peta IV-2. Peta Citra Kota Malang



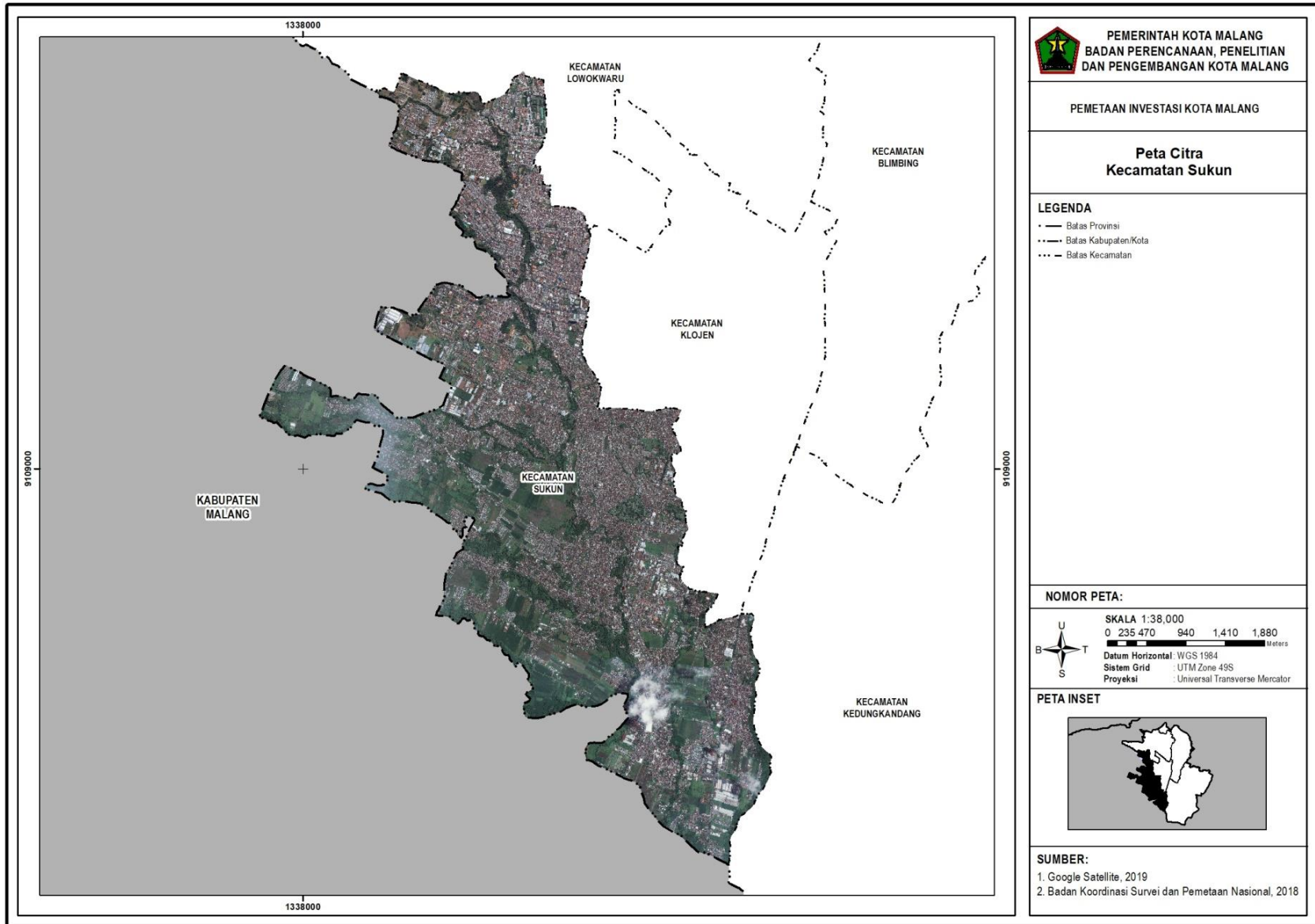
Peta IV-3. Peta Citra Kecamatan Klojen



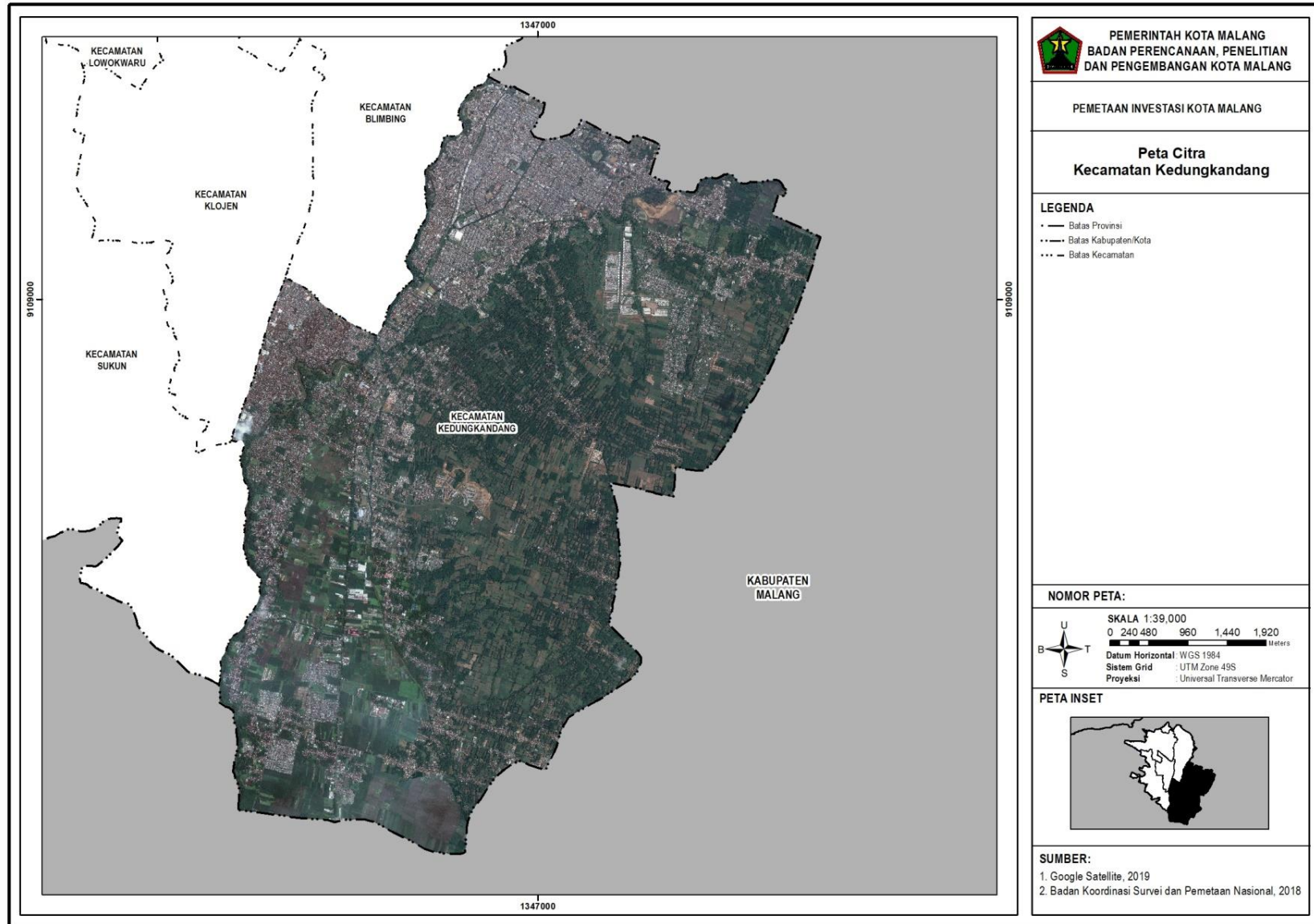
Peta IV-4. Peta Citra Kecamatan Klojen



Peta IV-5. Peta Citra Kecamatan Blimbing



Peta IV-6. Peta Citra Kecamatan Lowokwaru



Peta IV-7. Peta Citra Kecamatan Kedungkandang



Secara astronomis Kota Malang terletak pada 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan. Luas Kota Malang ialah 110,06 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedung Kandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru dan 57 Kelurahan yang tersebar di masing-masing kecamatan. Berikut merupakan luas rincian luas Kota Malang.

**Tabel IV-1.** Rincian Administratif Kota Malang

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Area (km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Kota (%)	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
Kedungkandang	Buring	39,89	36,24	Kotalama	8	43
				Mergosono	5	34
				Bumiayu	6	38
				Wonokoyo	13	93
				Buring	10	55
				Kedungkandang	13	120
				Lesanpuro	24	155
				Sawojajar	21	146
				Madyopuro	12	70
				Cemorokandang	7	74
				Arjowinangun	8	86
				Tlogowaru	8	43
				Bakalan Krajan	6	43
				Mulyorejo	7	51
Sukun	Bandungrejosari	20,97	19,05	Karangbesuki	9	78
				Ciotomulyo	5	62
				Gadang	8	65
				Kebonsari	5	41
				Bandungrejosari	11	108
				Sukun	9	109
				Tanjungrejo	13	137
				Pisangcandi	10	84
				Bandulan	7	58
				Klojen	7	46
Klojen	Gadingkasri	8,83	8,02	Samaan	8	58
				Rampalcelaket	6	35
				Kiduldalem	8	50
				Sukoharjo	7	57
				Kasin	11	96
				Kauman	10	67
				Oro-oro Dowo	10	97
				Bareng	8	74
				Gadingkasri	6	50
				Penanggungan	8	45
				Balearjosari	8	43
Blimbing	Arjosari	16,15	16,15	Arjosari	5	34
				Polowijen	6	38
				Purwodadi	13	93



Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Area (km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Kota (%)	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
Lowokwaru	Tulusrejo	20,53	20,53	Blimbing	10	55
				Pandanwangi	13	120
				Purwantoro	24	155
				Bunulrejo	21	146
				Ksatrian	12	70
				Polehan	7	74
				Jodipan	8	86
				Tasikmadu	6	28
				Tunggulwulung	6	49
				Merjosari	12	79
				Tlogomas	9	49
				Dinoyo	7	50
Sumbersari	7	40				
Ketawanggede	5	32				
Jatimulyo	10	74				
Tunjungsekar	8	73				
Mojolangu	19	112				
Tulusrejo	16	74				
Lowokwaru	15	104				

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka 2020

Pembagian wilayah yang terbagi menjadi lima kecamatan memiliki perbedaan pada tingkat perekonomian. Kecamatan Klojen yang berada pada posisi tengah Kota Malang berfungsi sebagai ibukota Kota Malang. Wilayah yang memiliki kawasan strategis pertumbuhan perekonomian yang tinggi salah satunya berada di Kecamatan Lowokwaru. Hal ini dikarenakan pada wilayah tersebut terdapat tempat-tempat yang menjadi pusat aktivitas seperti universitas, mall, pasar, dan tempat rekreasi lainnya. Selain itu, letak Kecamatan Lowokwaru juga dijadikan jalan utama untuk menuju Kota Batu. Berdasarkan **Tabel 4-1**, dapat diketahui bahwa Kecamatan Kedungkandang memiliki luas terbesar yaitu 36,24% dari luas total Kota Malang yang terbagi menjadi 12 kelurahan, 114 RW dan 848 RT. Selanjutnya, Kecamatan Lowokwaru memiliki luas terbesar kedua dengan persentase 20,53% yang terbagi menjadi 12 kelurahan, 120 RW dan 764 RT. Sedangkan luas area terkecil yaitu 8,83%. Berada pada ibukota Kota Malang yaitu Kecamatan Klojen.

Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Terdapat tiga titik acuan stasiun pengamatan yang ada di Kota Malang yaitu stasiun klimatologi Ciliwung, Kedungkandang, dan Sukun. Berikut merupakan data curah hujan Kota Malang berdasarkan tiga titik stasiun pengamatan.



**Tabel IV-2.** Curah Hujan Kota Malang Berdasarkan Tiga Titik Stasiun Pengamatan

Bulan	Ciliwung	Kedungkandang	Sukun
Januari	247	412	283
Februari	467	310	518
Maret	366	76	375
April	523	44	0
Mei	64	84	131
Juni	0	0	0
Juli	44	0	14
Agustus	0	0	0
September	0	0	0
Oktober	0	24	0
November	195	215	110
Desember	282	373	199

Sumber: Kata Malang Dalam Angka 2020

Berdasarkan **Tabel 4-2**, dapat diketahui bahwa musim hujan memiliki rentang bulan november hingga Mei dan musim kemarau pada bulan Juni-Oktober. Curah hujan tertinggi berada pada bulan April sebesar 523 selama 13 hari yang terpantau dari Stasiun Klimatologi Ciliwung. Pada Stasiun Klimatologi Kedungkandang, curah hujan tertinggi berada pada bulan Januari. Sedangkan pada Stasiun Klimatologi Sukun, curah hujan tertinggi berada pada bulan Februari.

Kota Malang dilihat dari aspek topografis terletak pada lokasi yang cukup tinggi yaitu 445 meter sampai 526 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Berikut merupakan ketinggian per kecamatan di Kota Malang.

**Tabel IV-3.** Ketinggian Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kota Malang

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
Kedungkandang	445
Sukun	445
Klojen	445
Blimbing	466
Lowokwaru	526

Sumber: Kata Malang Dalam Angka 2020

Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah Timur Kota Malang. Dengan letak lokasi yang tinggi dan berada di antara wilayah pegunungan, menjadikan Kota Malang sebagai kota yang berpotensi dalam pengembangan ekonomi. Dari atas pegunungan ini terlihat jelas pemandangan yang indah antara lain dari arah Barat terlihat barisan

Gunung Kawi dan Panderman, sebelah Utara adalah Gunung Arjuno, sebelah Timur adalah Gunung Semeru dan jika melihat ke bawah terlihat hamparan Kota Malang.

Secara geologi, wilayah Malang tersusun oleh batuan hasil kegiatan gunung api yang terdiri dari tufa, tufa pasir, breksi gunung api, aglomerat, dan lava. Secara hidrogeologi, akumulasi air tanah dapat dijumpai pada lapisan akuifer yang dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok akuifer dengan kedalaman kurang dari 40 meter, kelompok akuifer dengan kedalaman antara 40-100 meter, dan kelompok akuifer dengan kedalaman antara 100-150 meter. Pemanfaatan lahan pada wilayah Kota Malang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagian selatan termasuk daerah dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk pengembangan kawasan industri.
2. Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk aktivitas pengembangan budidaya pertanian.
3. Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan yang relatif kurang subur.
4. Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas dan berkembang menjadi daerah/kawasan pendidikan.

Kemudian jenis tanah di wilayah Kota Malang terdiri dari 4 (empat) macam, yakni:

1. Aluvial kelabu kehitaman dengan luas 6.930.267 ha.
2. Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 ha.
3. Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 ha.
4. Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765.160 ha.

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol terdapat di Kecamatan Lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15%.

Lokasi administrasi Kota Malang, dipandang dari aspek hidrologis, terletak pada Cekungan Air Tanah (CAT) Brantas. Di dalam Cekungan Air Tanah Brantas terkandung potensi dan cadangan air tanah dengan kualitas yang sangat bagus untuk bahan baku air minum. Wilayah Cekungan Air Tanah Brantas ini mempunyai wilayah cekungan yang terbesar di Propinsi Jawa Timur. Karena letak Kota Malang yang berada pada Cekungan Air Tanah Brantas ini, maka pemerintah daerah melalui PDAM saat ini menggunakannya sebagai bahan baku utama untuk air minum bagi masyarakat Kota Malang. Sementara itu, perairan permukaannya berupa aliran beberapa sungai yang berfungsi sebagai bahan baku pengairan maupun untuk saluran pembuangan

akhir dari drainase kota. Di wilayah Kota Malang terdapat 4 (empat) sungai utama yang cukup besar, yaitu Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Mewek-Kalisari Bango, dan Sungai Amprong. Sungai-sungai yang lain adalah merupakan sungai-sungai relatif kecil yang merupakan sungai pecahan, maupun sungai terusan dari keempat sungai besar tersebut. Kondisi Kota Malang berada pada daerah lereng gunung sehingga Kota Malang menjadi jalur aliran air bagi daerah dataran rendah di bawahnya.

## 4.2 Gambaran Umum Investasi di Kota Malang

Kemajuan perekonomian suatu wilayah tidak bisa lepas dari pemanfaatan sumber daya termasuk aset yang dimiliki pemerintah daerah maupun swasta. Dalam memanfaatkan sumber daya menjadi kekuatan ekonomi, maka kegiatan investasi menjadi salah satu “mesin penggerak” (Hanim dan Ragimun, 2010). Menurut Obrist et al (2007), aset yang dimaksud terdiri dari:

- a) *Human Capital*, yang meliputi: pengetahuan, pendidikan, keterampilan, sikap, keyakinan, dan status kesehatan.
- b) *Social Capital*, yang meliputi: jaringan sosial dan afiliasi.
- c) *Natural Capital*, yang meliputi: tanah, air, dan peternakan.
- d) *Physical Capital*, yang meliputi: infrastruktur, peralatan dan sarana transportasi.
- e) *Financial Capital*, yang meliputi: keuangan atau biaya secara tunai maupun kredit.

### 4.2.1 Karakteristik Penduduk dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Malang

Ditinjau dari karakteristik kependudukan, Kota Malang memiliki jumlah penduduk sebesar 927.285 jiwa pada Tahun 2019 dengan perbandingan jumlah penduduk pria sebesar 429.416 jiwa dan wanita sebesar 441.266 jiwa. Kota Malang memiliki rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang sebesar 99,62 yang ini artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Persebaran penduduk pada tiap wilayah administratif Kecamatan di Kota Malang diketahui bahwa Kecamatan Klojen memiliki kontribusi terbesar yaitu 220.055 jiwa, kemudian Kecamatan Blimbing sebesar 214.650 jiwa, Kecamatan Kedungkandang sebesar 202.514 jiwa, Kecamatan Lowokwaru sebesar 179.013 jiwa dan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Sukun yaitu sebesar 111.053 jiwa.

Sementara itu, tingkat kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Klojen dengan tingkat kepadatan mencapai 24.921 Jiwa/km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan

Kedungkandang yang mencapai 5.077 jiwa/ km<sup>2</sup>. Lebih jelasnya, tingkat jumlah dan tingkat kepadatan penduduk dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Tabel IV-4. Jumlah Penduduk Kota Malang**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)*
1	Kedungkandang	202.514
2	Sukun	111.053
3	Klojen	220.005
4	Blimbing	214.650
5	Lowokwaru	179.013
<b>Jumlah Hasil Registrasi (2019)</b>		927.285
<b>Jumlah Hasil Proyeksi (2019)</b>		870.862
<b>2018</b>		866.118
<b>2017</b>		861.414
<b>2016</b>		856.410
<b>2015</b>		851.298

Sumber: Kota Malang Dalam Angka Tahun 2020

Persebaran kepadatan penduduk pada tiap wilayah administratif Kecamatan di Kota Malang diketahui bahwa Kecamatan Klojen memiliki kepadatan penduduk yang tinggi yaitu 24.921 Jiwa/Km<sup>2</sup>, kemudian Kecamatan Blimbing 13.391 Jiwa/Km<sup>2</sup>, Kecamatan Lowokwaru sebesar 8.720 Jiwa/Km<sup>2</sup>, Kecamatan Sukun sebesar 5.296 Jiwa/Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Kedungkandang yaitu sebesar 5.007 Jiwa/Km<sup>2</sup>.

Kualitas sumber daya manusia Kota Malang dapat ditinjau melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Kota Malang (2020), pembangunan manusia di Jawa Timur pada tahun 2019 terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang mencapai 80,89 dan selanjutnya pada tahun 2019 mencapai 81,32 atau tumbuh 0,53 persen.

Di Kota Malang, selama periode 2018 hingga 2019, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 73,15 tahun, meningkat 0,22 tahun. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 15,41 tahun, meningkat 0,01 tahun. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah

menempuh pendidikan selama 10,17 tahun meningkat 0,01 tahun. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (harga konstan 2012) telah mencapai Rp. 16,67 juta, meningkat Rp.508 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan seluruh komponen tersebut menyebabkan kenaikan IPM secara umum. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan pertumbuhan IPM Kota Malang periode 2013-2019.

**Gambar 4-1.** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang, 2013-2019



Sumber: BPS Kota Malang, 2020.

Pembangunan manusia di Kota Malang secara kontinu mengalami kemajuan selama periode 2013-2019. Dari 78,44 (2013) meningkat menjadi 81,32 (2019) atau selama periode tersebut tumbuh 5,85 persen. Rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu 2013-2019 sebesar 0,60 persen per tahun. Kontinuitas pembangunan manusia di Kota Malang menunjukkan keberhasilan upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Ke depan, pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan IPM Kota Malang, agar tetap berada pada kategori IPM “sangat tinggi”.

#### 4.2.2 Karakteristik Perekonomian Kota Malang

Kondisi ekonomi menunjukkan aktivitas dan perkembangan kontribusi setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Kontribusi setiap lapangan usaha memberikan informasi terkait besarnya peran lapangan usaha dalam menggerakkan perekonomian suatu daerah. Perekonomian wilayah diarahkan untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar kecamatan di dalam wilayah kota yang dapat diwujudkan dengan optimalisasi sektor-sektor unggulan ekonomi. Perkembangan dan prospek pengembangan ekonomi pada dapat dilihat melalui *trend* perkembangan kegiatan

ekonomi eksisting yang saat ini dikembangkan serta isu-isu pengembangan pada sektor ekonomi yang akan dikembangkan. Berikut merupakan data persentase kontribusi lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang tahun 2015-2019.

**Tabel IV-5.** Tabel persentase kontribusi lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang tahun 2015-2019

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pertanian Kehutanan dan Perikanan	0,3	0,29	0,27	0,26	0,27
Penggalian	0,1	0,09	0,08	0,08	0,07
Industri Pengolahan	26,51	25,4	25,23	23,47	25,73
Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Pengadaan Air Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18
Konstruksi	12,52	12,92	13,07	12,78	12,61
Perdagangan besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,9	29,54	29,29	29,61	29,46
Transportasi dan Pergudangan	2,41	2,45	2,57	2,56	2,61
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,79	4,9	5,02	5	5,17
Informasi dan Komunikasi	3,97	3,98	4,03	3,94	3,89
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,97	3,04	2,99	2,95	2,84
Real Estate	1,41	1,41	1,39	1,43	1,45
Jasa Perusahaan	0,77	0,78	0,78	0,81	0,82
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,52	1,48	1,46	1,48	0,48
Jasa Pendidikan	8,15	8,13	8,23	8,13	8,06
Kegiatan Sosial	2,49	2,5	2,57	2,53	2,59
Jasa Lainnya	2,97	2,87	2,79	2,76	2,73

Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2020

Berdasarkan Tabel 4-5, dapat diketahui bahwa lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih menjadi lapangan usaha dengan kontribusi terbesar dalam struktur ekonomi Kota Malang. Di mana lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor selama kurun waktu 2013-2019 masih mendominasi didalam pembentukan PDRB Kota Malang, dengan kontribusi rata-rata persentase pertahun sebesar 29%. Selanjutnya kontribusi kedua terbesar ditunjukkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan mencapai rata-rata pertahun sebesar 28% terhadap PDRB Kota Malang. Kemudian ketiga diikuti oleh lapangan usaha konstruksi yang mencapai rata-rata 13% pertahunnya selama periode 2013 – 2016 terhadap PDRB Kota Malang. Sementara lapangan usaha lainnya hanya memberikan kontribusi di bawah 8% dengan kontribusi terkecil berada pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 0,03%.

### 4.3 Pemetaan Investasi di Kota Malang

#### 4.3.1 Analisis LQ (Location Quotient)

Analisis LQ (*Location Quotient*) digunakan untuk menunjukkan lokasi pemusatan/basis aktivitas dan mengetahui kapasitas ekspor perekonomian wilayah serta tingkat kecukupan barang/jasa dari produksi lokal suatu wilayah. Nilai LQ merupakan indeks untuk membandingkan pangsa sub wilayah dalam aktivitas tertentu dengan pangsa total aktivitas tersebut secara total. Analisis LQ dapat juga digunakan untuk mengetahui apakah sektor-sektor ekonomi tersebut termasuk kegiatan basis atau bukan basis sehingga dapat melihat sektor-sektor yang termasuk ke dalam kategori sektor unggulan. Perhitungan LQ digunakan untuk menunjukkan perbandingan antar peranan sektor tingkat regional dengan peran sektor wilayah tingkat yang lebih luas. Tidak meratanya penyebaran ekonomi yang pada umumnya hanya terkonsentrasi pada beberapa daerah saja memberikan indikasi bahwa produk ekonomi wilayah merupakan komoditi ekspor. Berdasarkan konsep basis ekonomi dengan analisis LQ, pendapatan dari sektor basis akan memberikan dampak positif yang luas dalam pertumbuhan perekonomian suatu wilayah.

Indikator bahwa suatu sektor ekonomi dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan adalah ketika sektor ekonomi tersebut mampu menjadi sektor basis, yakni apabila memiliki nilai *Locations Quotient* (LQ) lebih besar dari satu ( $LQ > 1$ ). Sedangkan apabila memiliki nilai kurang dari satu ( $LQ < 1$ ) maka tergolong dalam sektor non basis. Berikut merupakan hasil perhitungan LQ pada sektor-sektor di Kota Malang.

**Tabel IV-6.** Perhitungan LQ Kota Malang 2016-2018

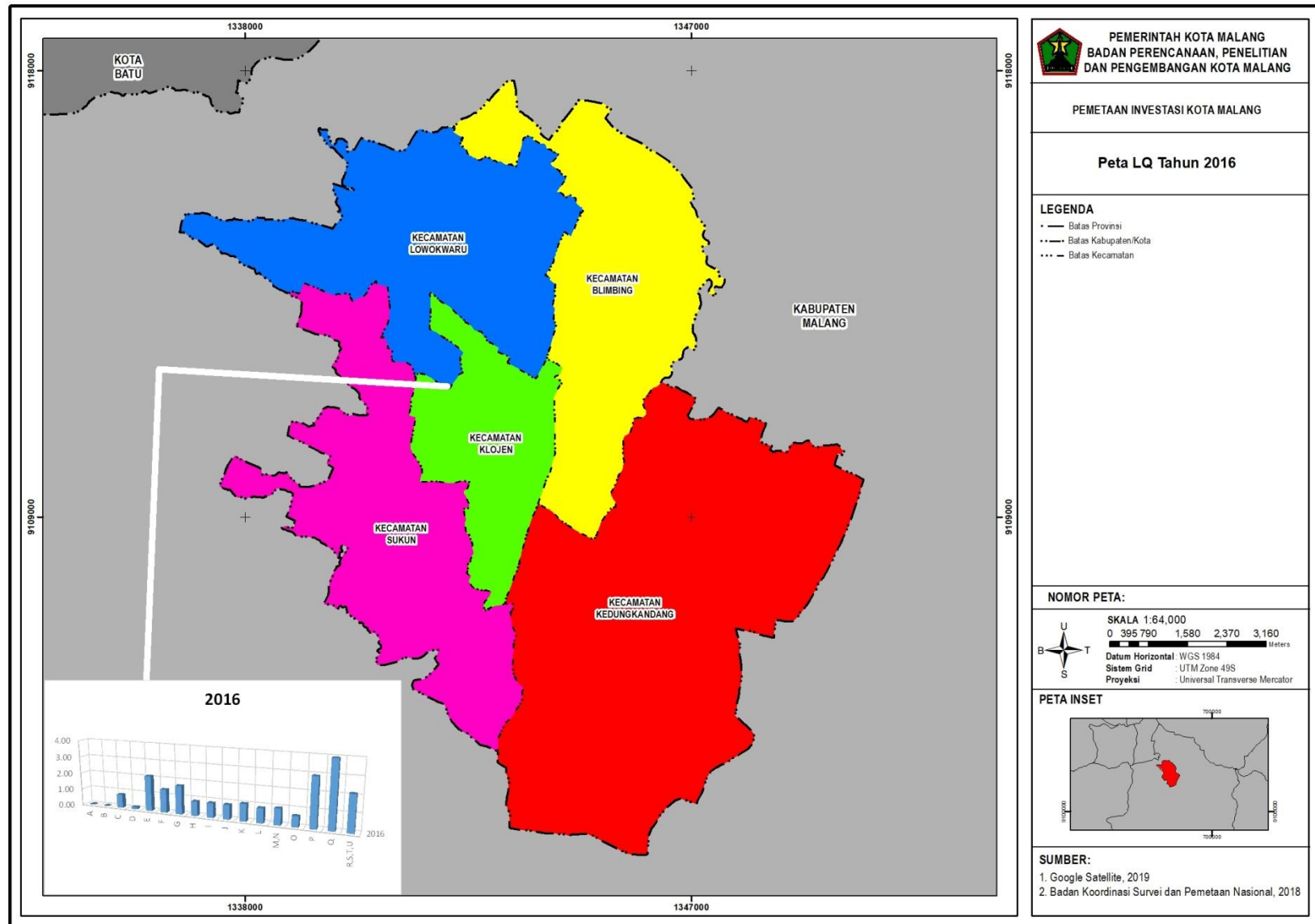
Sektor	LQ			Rata-Rata
	2016	2017	2018	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,02	0,02	0,02	0,02
Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,01	0,01	0,01
Industri Pengolahan	0,81	0,79	0,77	0,79
Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,12	0,13	0,12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	<b>2,12</b>	<b>2,13</b>	<b>2,16</b>	<b>2,14</b>
Konstruksi	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>1,39</b>	<b>1,39</b>
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	<b>1,71</b>	<b>1,69</b>	<b>1,69</b>	<b>1,70</b>
Transportasi dan Pergudangan	0,87	0,89	0,87	0,87
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,86	0,86	0,85	0,86
Informasi dan Komunikasi	0,87	0,88	0,87	0,87
Jasa Keuangan dan Asuransi	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	<b>1,02</b>	<b>1,03</b>
Real Estate	0,88	0,88	0,88	0,88



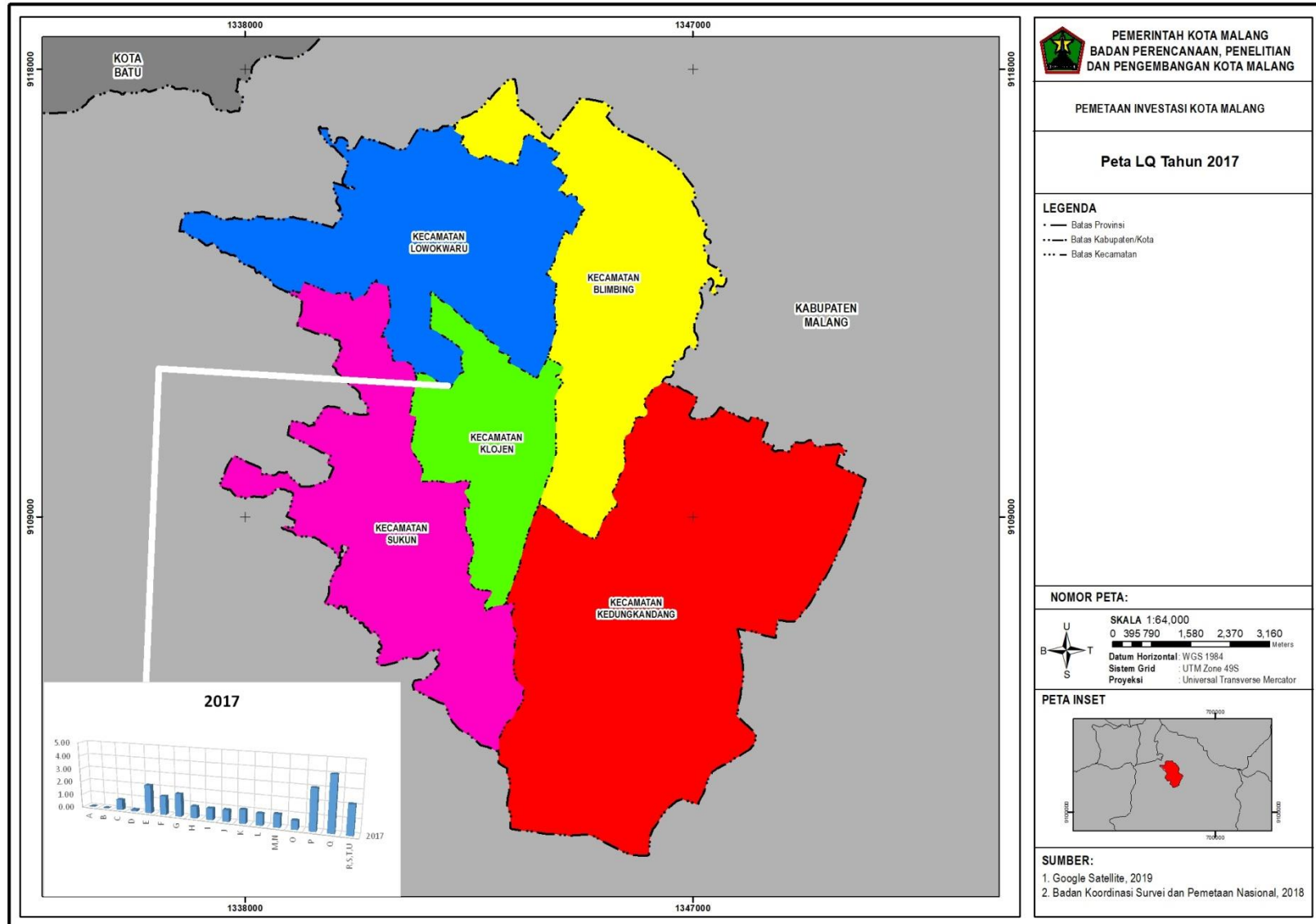
Sektor	LQ			Rata-Rata
	2016	2017	2018	
Jasa Perusahaan	0,97	0,96	0,97	0,97
Ad. Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	0,64	0,64	0,64	0,64
Jasa Pendidikan	<b>2,93</b>	<b>3,02</b>	<b>3,03</b>	<b>2,99</b>
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	<b>3,95</b>	<b>4,03</b>	<b>4,01</b>	<b>4,00</b>
Jasa Lainnya	<b>2,16</b>	<b>2,15</b>	<b>2,13</b>	<b>2,14</b>

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa terdapat tujuh sektor yang tergolong dalam sektor basis Kota Malang. Sektor-sektor tersebut di antaranya ialah Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Dan Daur Ulang, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor, sektor keuangan dan asuransi, sektor pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Wajib, dan Jasa Lainnya Sektor-sektor tersebut memiliki nilai LQ lebih dari 1 ( $LQ > 1$ ). Dengan demikian dapat diartikan bahwa sektor ekonomi tersebut mampu mengeksport hasil produksinya ke daerah lainnya. Kontribusi yang mampu diberikan sektor-sektor ekonomi tersebut di Kota Malang lebih besar daripada kontribusi sektor-sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur. Sebaliknya, sepuluh sektor ekonomi yang lainnya tergolong kedalam sektor non basis. Sektor ekonomi tersebut adalah sektor pertanian, perhutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Jasa Perusahaan, dan Ad. Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib. Sektor-sektor ekonomi tersebut memiliki nilai *Locations Quotient* (LQ) yang kecil, yakni  $LQ < 1$ . Hal ini berarti bahwa sektor ekonomi tersebut belum mampu untuk mencukupi kebutuhan konsumsi domestik dan cenderung melakukan impor dari luar daerah untuk menutupi kekurangan kebutuhan yang terjadi.

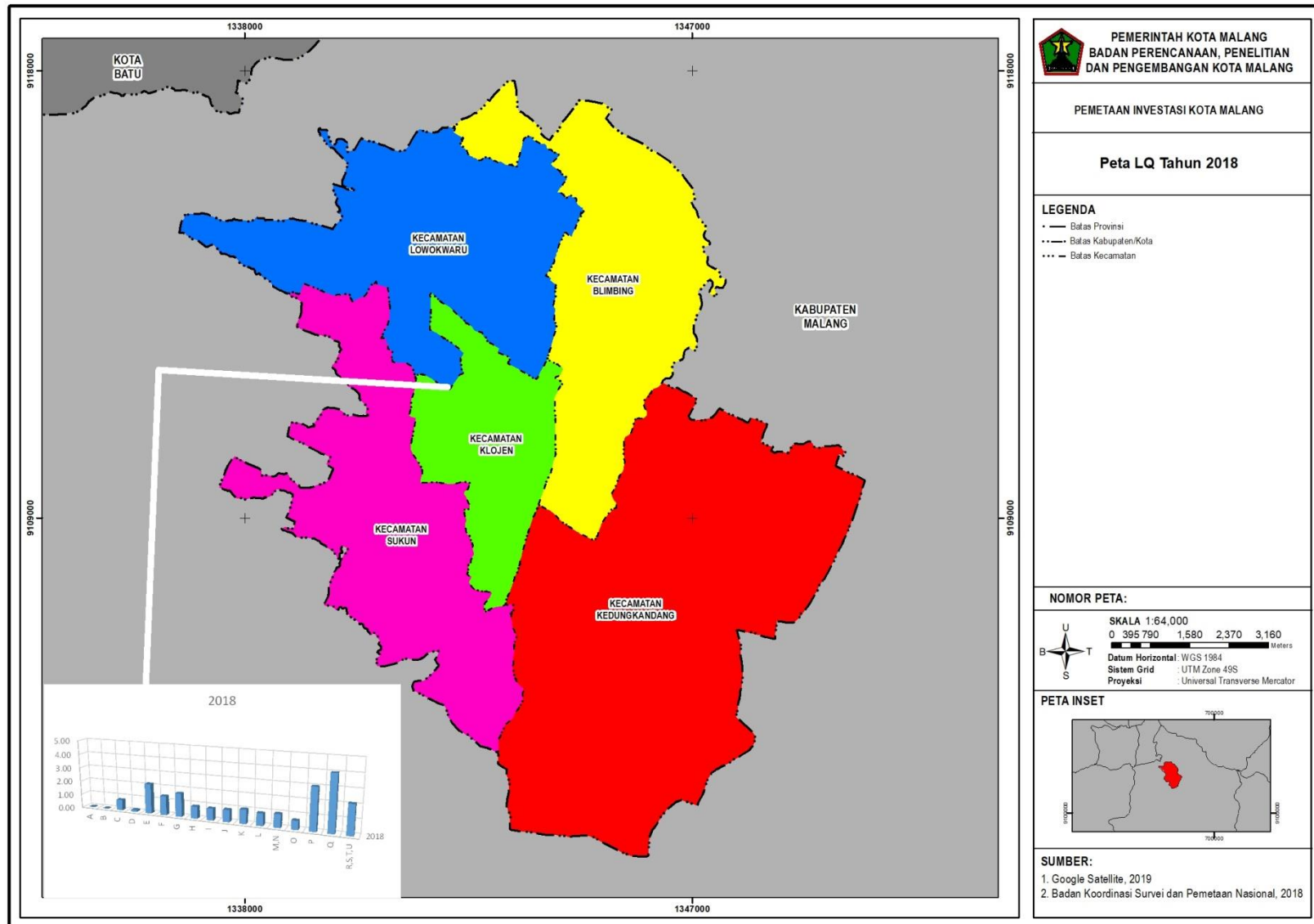




Peta IV-8. Peta LQ Kota Malang Tahun 2016



Peta IV-9. Peta LQ Kota Malang Tahun 2017



Peta IV-10. Peta LQ Kota Malang Tahun 2018

#### 4.3.2 Analisis *Shift Share*

Analisis *shift share* adalah salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi sebagai pembanding atau referensi. Untuk tujuan tersebut, analisis ini menggunakan 3 informasi dasar yang berhubungan satu sama lain yaitu : *Pertama*, pertumbuhan ekonomi referensi propinsi atau nasional (*national growth effect*), yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian daerah. *Kedua*, pergeseran proporsional (*proporsional shift*) yang menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di referensi propinsi atau nasional. Pergeseran proporsional (*proportional shift*) disebut juga pengaruh bauran industri (*industri mix*). Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan referensi. *Ketiga*, pergeseran diferensial (*differential shift*) yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan referensi. Jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Pergeseran diferensial disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif.

**Tabel IV-7. Perhitungan Shift Share Kota Malang**

Sektor	Pertumbuhan nasional (Nij)	Industri Mix Share (Mij)	differential Shift (Cij)	Shif share (Dij)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,9059	-8,1610	-3,5206	-5,7757
Pertambangan dan Penggalian	1,9837	-1,1240	0,5125	1,3722
Industri Pengolahan	596,0699	223,3256	258,8129	1078,2084
Pengadaan Listrik dan Gas	0,9607	-1,3427	-1,5571	-1,9391
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	5,3693	-1,2853	-1,8929	2,1911
Konstruksi	330,7323	67,3170	51,9277	449,9771
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	803,4504	116,2055	13,3422	932,9981
Transportasi dan Pergudangan	67,3790	13,0966	26,9947	107,4703
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	118,8948	46,2451	41,5537	206,6936



Sektor	Pertumbuhan nasional (Nij)	Industri Mix Share (Mij)	differential Shift (Cij)	Shif share (Dij)
Informasi dan Komunikasi	129,0624	29,4624	6,1889	164,7138
Jasa Keuangan dan Asuransi	68,0535	-9,6418	4,1983	62,6101
Real Estate	38,5438	5,2219	-5,4197	38,3460
Jasa Perusahaan	19,2205	5,7963	-2,4036	22,6132
Ad. Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	36,1105	-8,4919	-1,6242	25,9944
Jasa Pendidikan	204,2156	-2,3680	-14,8214	187,0262
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68,1075	26,2596	3,6590	98,0261
Jasa Lainnya	79,1002	-7,4132	12,5876	84,2746

Berdasarkan Tabel, dapat diketahui bahwa seluruh sektor PDRB Kota Malang memiliki pertumbuhan nasional (Nij) yang bernilai positif. Hal tersebut berarti bahwa semua sektor ekonomi dalam perekonomian Kota Malang tumbuh lebih cepat apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan sektoral Provinsi Jawa Timur. Sektor ekonomi dengan nilai pertumbuhan nasional tertinggi ialah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 803,4504. Selain itu, terdapat lima sektor yang memiliki nilai negatif pada Industri Mix Share (mij) ialah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Artinya, kelima sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektoral Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut berarti bahwa sektor-sektor tersebut tergolong sektor yang tumbuhnya lambat di Kota Malang. Sedangkan sektor-sektor ekonomi yang bernilai positif cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan sektor ekonomi Jawa Timur. Sektor yang memiliki nilai tertinggi pada Industri Mix Share (mij) ialah Industri Pengolahan sebesar 223,3256.

Dalam komponen perhitungan *Differential Shift* ( $C_{ij}$ ) dapat diketahui bahwa terdapat sepuluh sektor yang memiliki nilai positif diantaranya yaitu Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Kontruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya. Artinya, sektor-sektor tersebut memiliki daya saing yang tinggi. Sektor ekonomi yang memiliki daya saing paling tinggi dari seluruh sektor ekonomi di Kota Malang dalam pangsa pasar wilayah adalah

sektor Industri Pengolahan dengan nilai komponen *Differential Shift* sebesar 258,8129. Sedangkan terdapat tujuh sektor yang memiliki nilai *Differential Shift* negatif yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Real Estate, Jasa Perusahaan, Ad. Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib, dan Jasa Pendidikan. Artinya ketujuh sektor tersebut memiliki daya saing yang rendah.

#### 4.4 Pembahasan Investasi di Kota Malang

Sektor unggulan Kota Malang dipilih berdasarkan hasil analisa LQ dan Shif Share. Apabila memiliki nilai LQ berupa basis dan nilai differential Shift dari shif share berupa kompetitif maka sektor tersebut merupakan sektor unggulan di Kota Malang. Berdasarkan analisa tersebut, terdapat lima sektor unggulan di Kota Malang yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Jasa Kontruksi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya. Adanya sektor-sektor unggulan tersebut dapat membuka peluang investasi mengingat besarnya peran sektor tersebut terhadap Kota Malang.

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat sektor unggulan di luar sektor analisa tersebut dimana sektor tersebut sebenarnya mempunyai potensi sebagai sektor penggerak sektor-sektor ekonomi lainnya serta berpotensi menopang perekonomian daerah setempat, akan tetapi karena kontribusi dan perkembangannya jika dibandingkan dengan tingkat perkembangan di Propinsi Jawa Timur masih belum sebanding. Berkembangnya sektor-sektor tersebut dapat dibuktikan dengan besarnya investasi yang masuk dalam Kota Malang. Berikut merupakan data investasi Kota Malang berdasarkan sektor.

**Tabel IV-8. Investasi Kota Malang Tahun 2019**

No	Sektor	Total Investasi (2019)	Persentase
1	Pertanian	Rp 6.512.000.000	1%
2	Peternakan	Rp 1.300.000.000	0%
3	Perikanan	Rp -	0%
4	Perkebunan/Kehutanan	Rp -	0%
5	Pertambangan dan Galian Gol C	Rp 550.000.000	0%
6	Perindustrian	Rp -	0%
7	Perdagangan	Rp 952.201.236.121	77%
8	Perhotelan	Rp -	0%
9	Restoran/Rumah Makan/Cafe	Rp -	0%
10	Perumahan dan Ruko	Rp -	0%
11	Perkantoran, Supermarket, dan Supermall	Rp -	0%



No	Sektor	Total Investasi (2019)	Persentase
12	Jasa Kontruksi	Rp 500.000.000	0%
13	Pergudangan	Rp -	0%
14	Transportasi	Rp 36.526.377.983	3%
15	Transportasi Darat/Laut	Rp 700.000.000	0%
16	Kesehatan	Rp -	0%
17	Koprasi	Rp 19.029.674.675	2%
18	Jasa Hiburan/Rekreasi	Rp 2.891.175.702	0%
19	Lain-lain	Rp 219.324.163.104	18%
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 1.239.534.627.585</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019

Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa Total investasi Kota Malang pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.239.534.627.585. Sektor perdagangan memiliki investasi tertinggi dengan total Rp. 952.201.236.121. Sektor perdagangan memiliki kontribusi investasi yang besar dibandingkan dengan sektor lainnya itu 77%. Hal ini sesuai dengan hasil analisa LQ dan Shift Share dimana sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil menjadi sektor unggulan di Kota Malang. Selain itu Sektor Jasa Lainnya juga termasuk berkontribusi dalam investasi Kota Malang sebesar 18%. Adapun sektor lain yang berkontribusi namun tidak termasuk dalam sektor unggulan ialah sektor transportasi dengan kontribusi investasi sebesar 3%.

#### 4.5 Pemetaan Investasi dan Tenaga Kerja

##### 4.5.1 Pemetaan Investasi di Kota Malang

Kondisi Investasi di Kota Malang terdistribusi ke dalam 5 (lima) kecamatan dengan masing-masing kondisi investasi yang berbeda antar satu wilayah dengan lainnya. Secara detil hal ini diketahui sebagaimana berikut.

1. Kecamatan Blimbing.

Pada kecamatan ini terdapat potensi investasi obyek wisata prioritas; industri dan pergudangan; serta perdagangan dan jasa skala kecil menengah.

2. Kecamatan Kedungkandang.

Pada Kecamatan ini, relative terdapat lebih sedikit investasi dan hanya muncul potensi di bidang investasi perdagangan dan jasa skala kecil menengah.

3. Kecamatan Klojen



Pada kecamatan ini, banyak investasi berupa obyek wisata prioritas diikuti dengan potensi di bidang perdagangan dan jasa skala kecil menengah; investasi di bidang industri dan perdagangan; serta investasi di bidang kebutuhan fasilitas perdagangan.

4. Kecamatan Lowokwaru

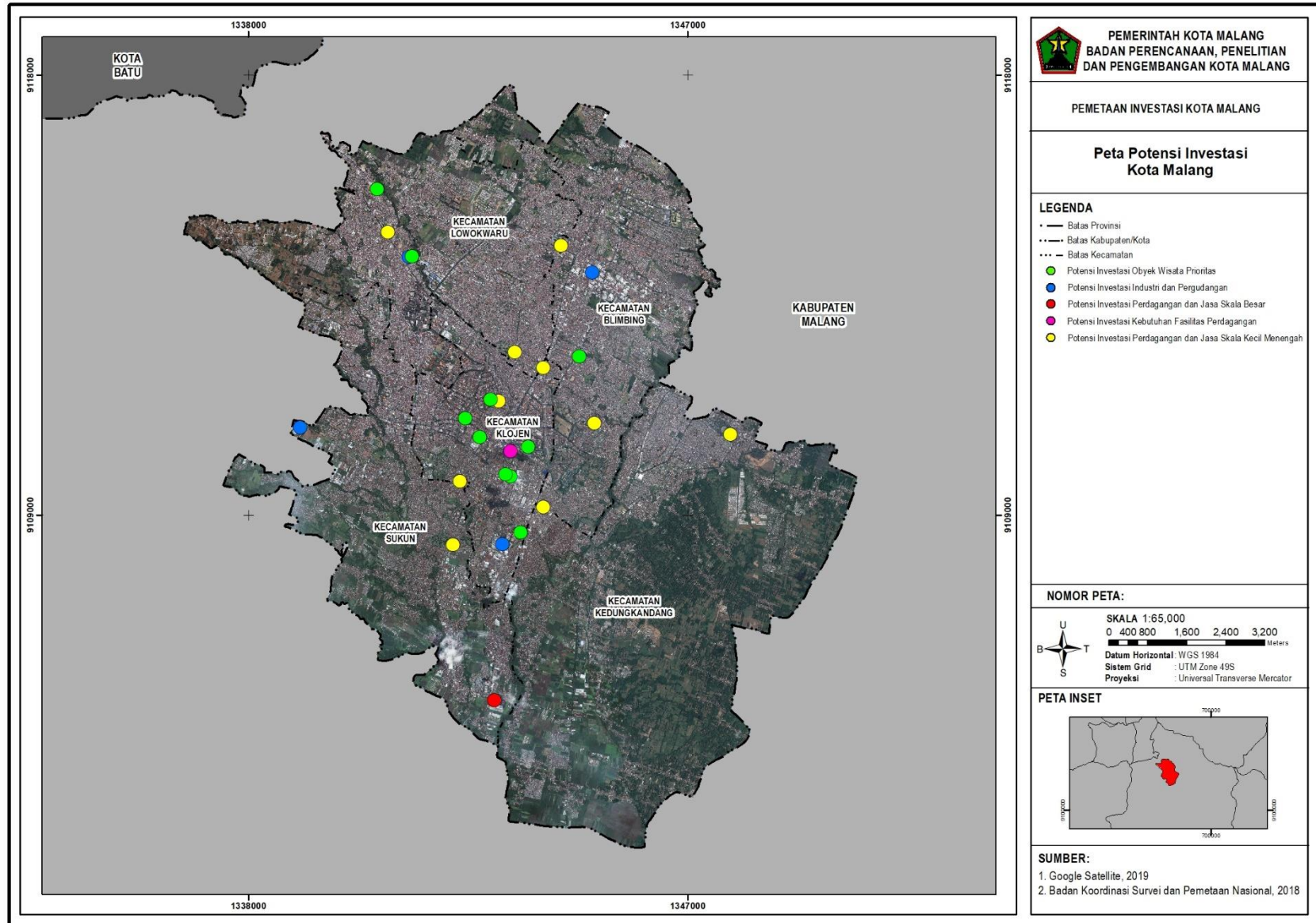
Pada Kecamatan Lowokwaru, potensi investasi yang muncul adalah potensi investasi obyek wisata prioritas; dan potensi investasi bidang perdagangan dan jasa skala kecil menengah.

5. Kecamatan Sukun

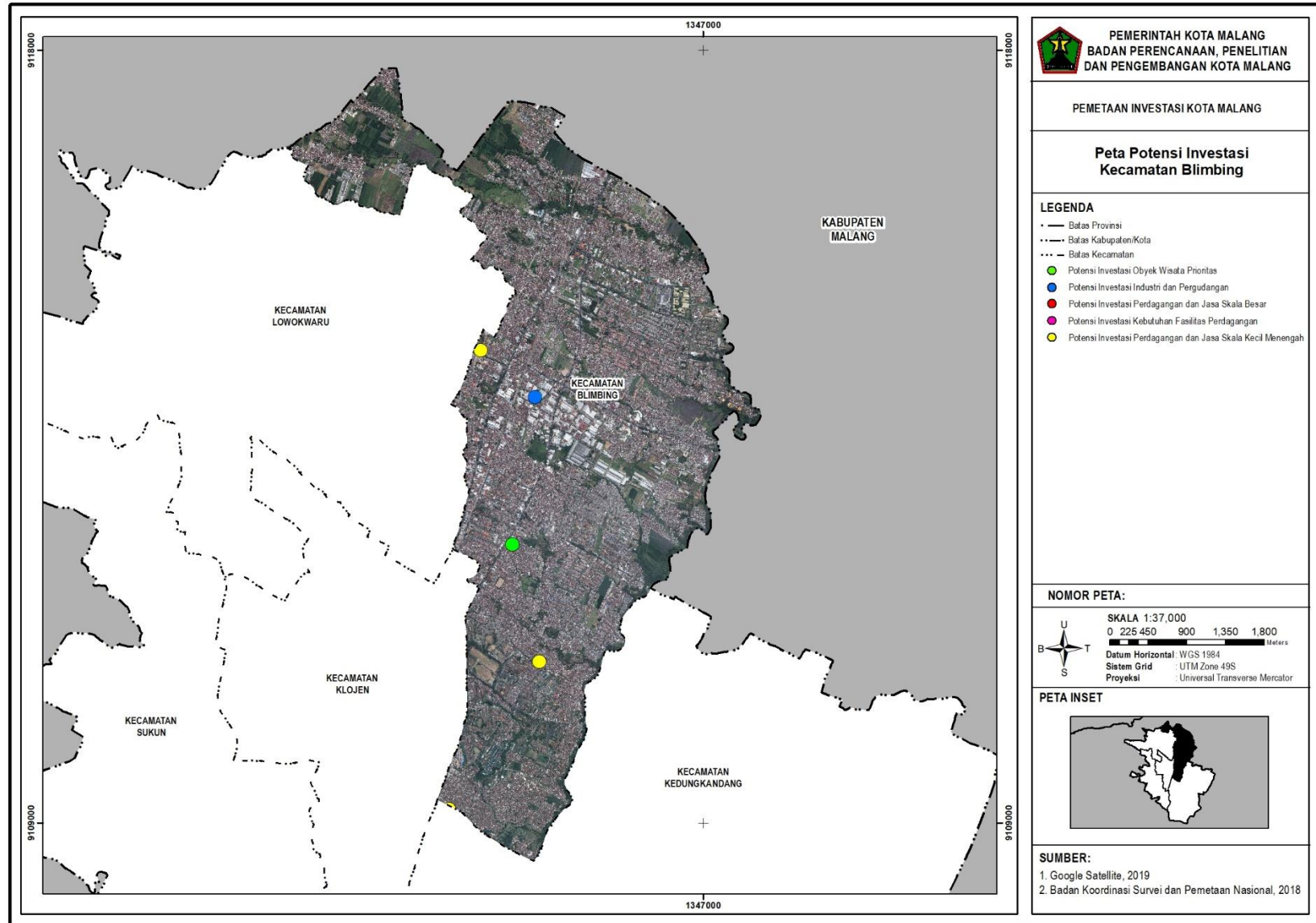
Pada Kecamatan Sukun, terdapat potensi investasi di bidang Perdagangan dan jasa skala besar; industri dan perdagangan; serta perdagangan dan jasa skala kecil menengah.

Lebih detail mengenai potensi yang berdasarkan wilayah (kecamatan) di Kota Malang dapat ditinjau melalui peta yang telah terbentuk di bawah.

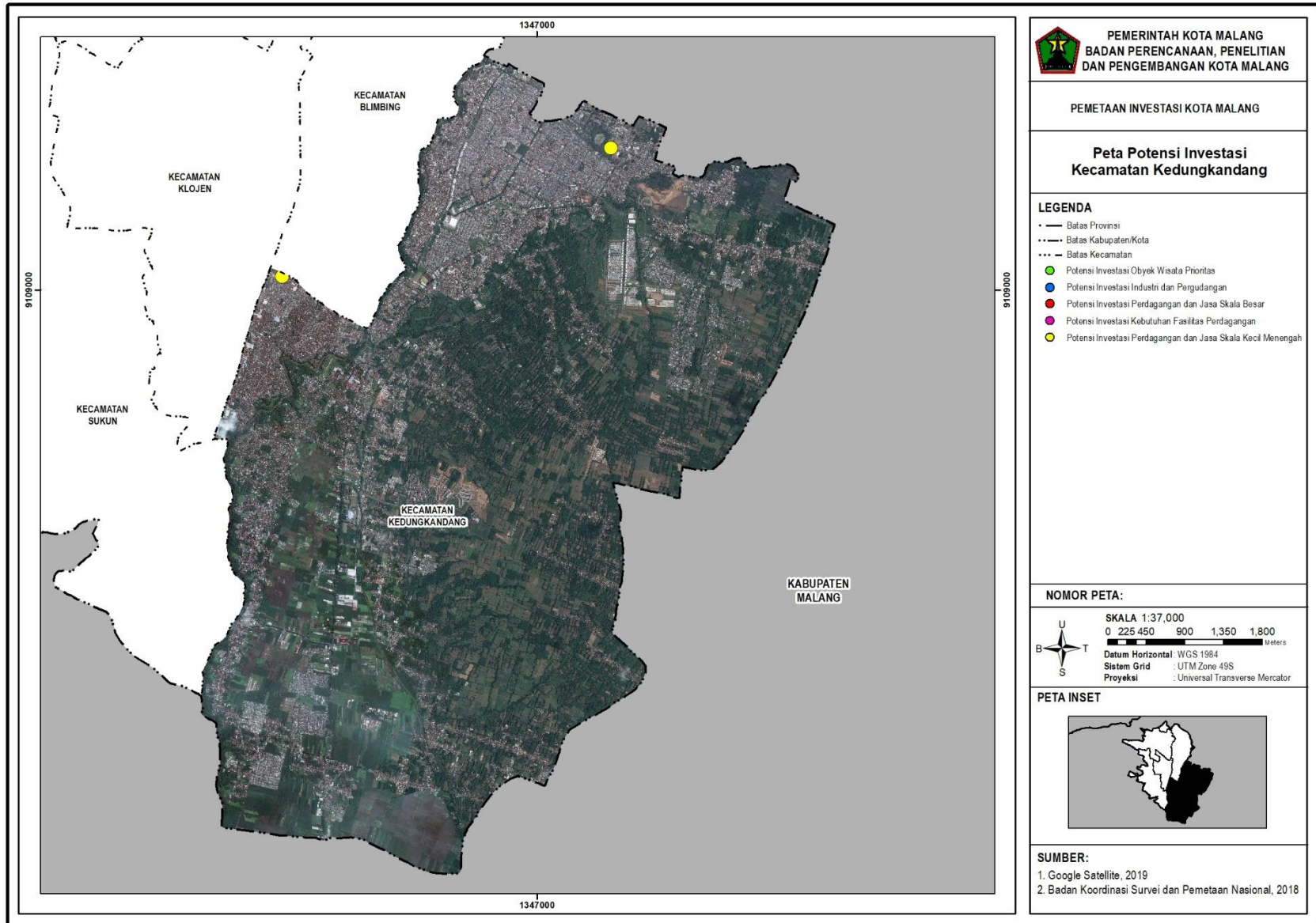




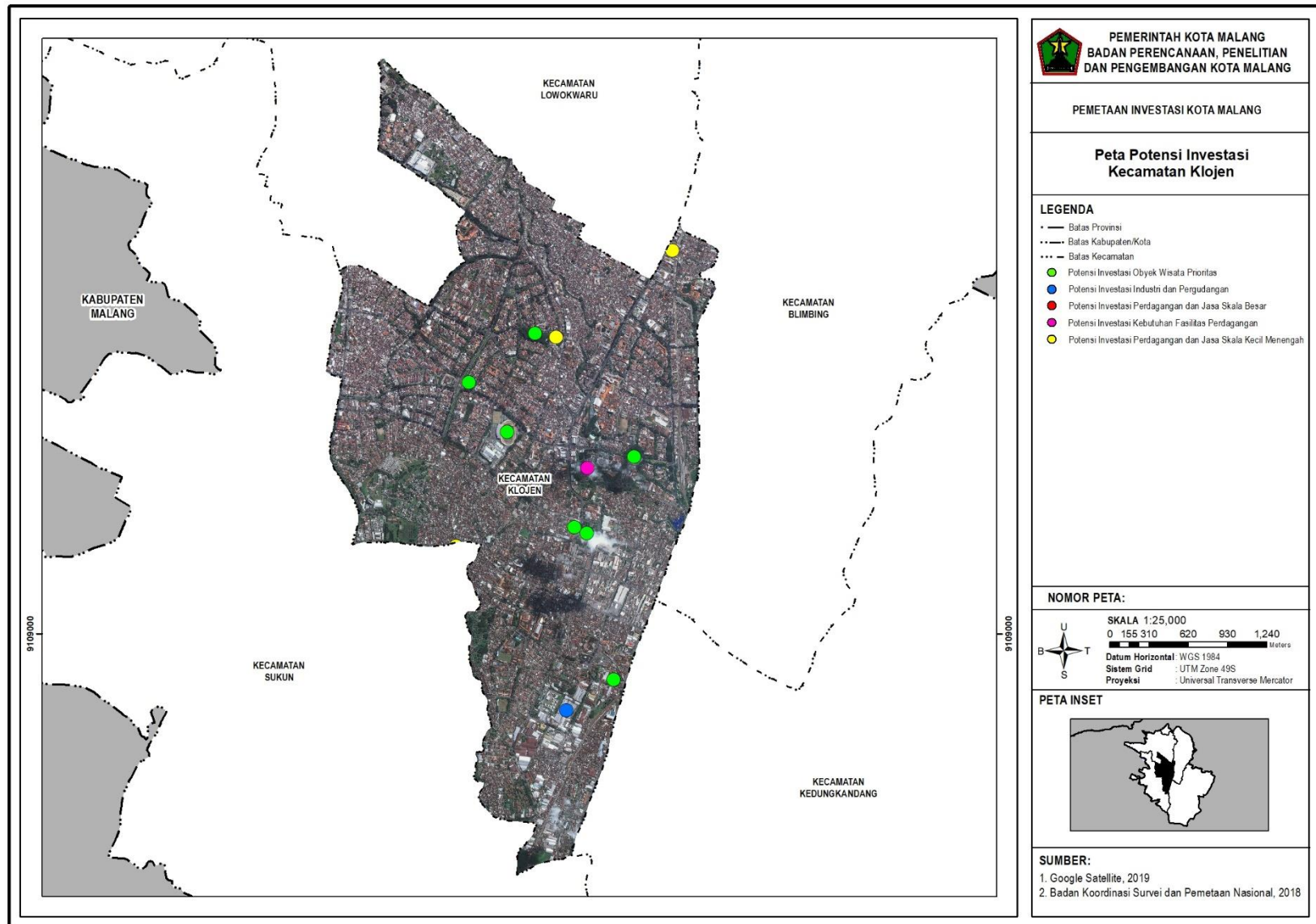
Peta IV-11. Peta Potensi Investasi Kota Malang



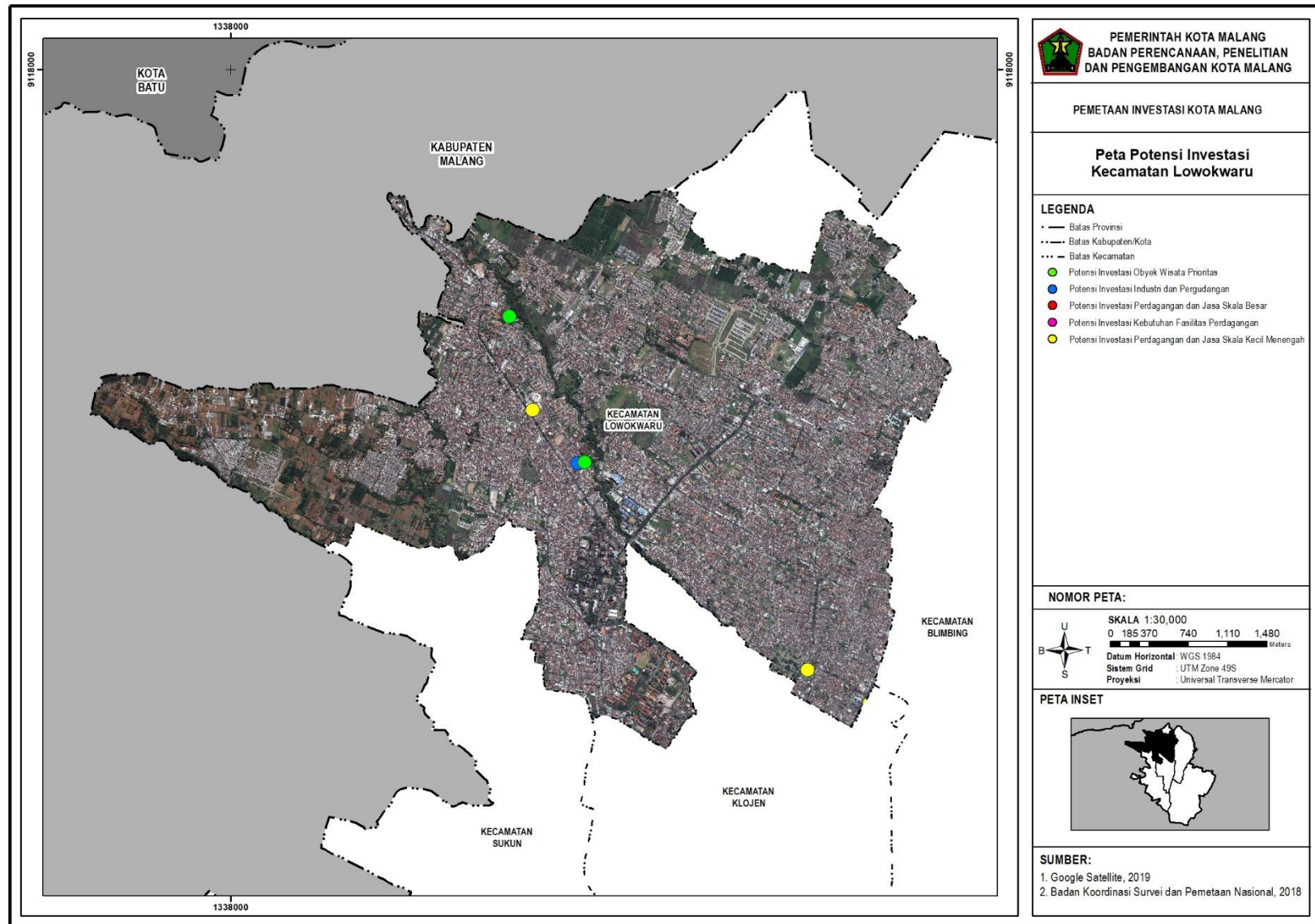
Peta IV-12. Peta Potensi Investasi Kecamatan Blimbing



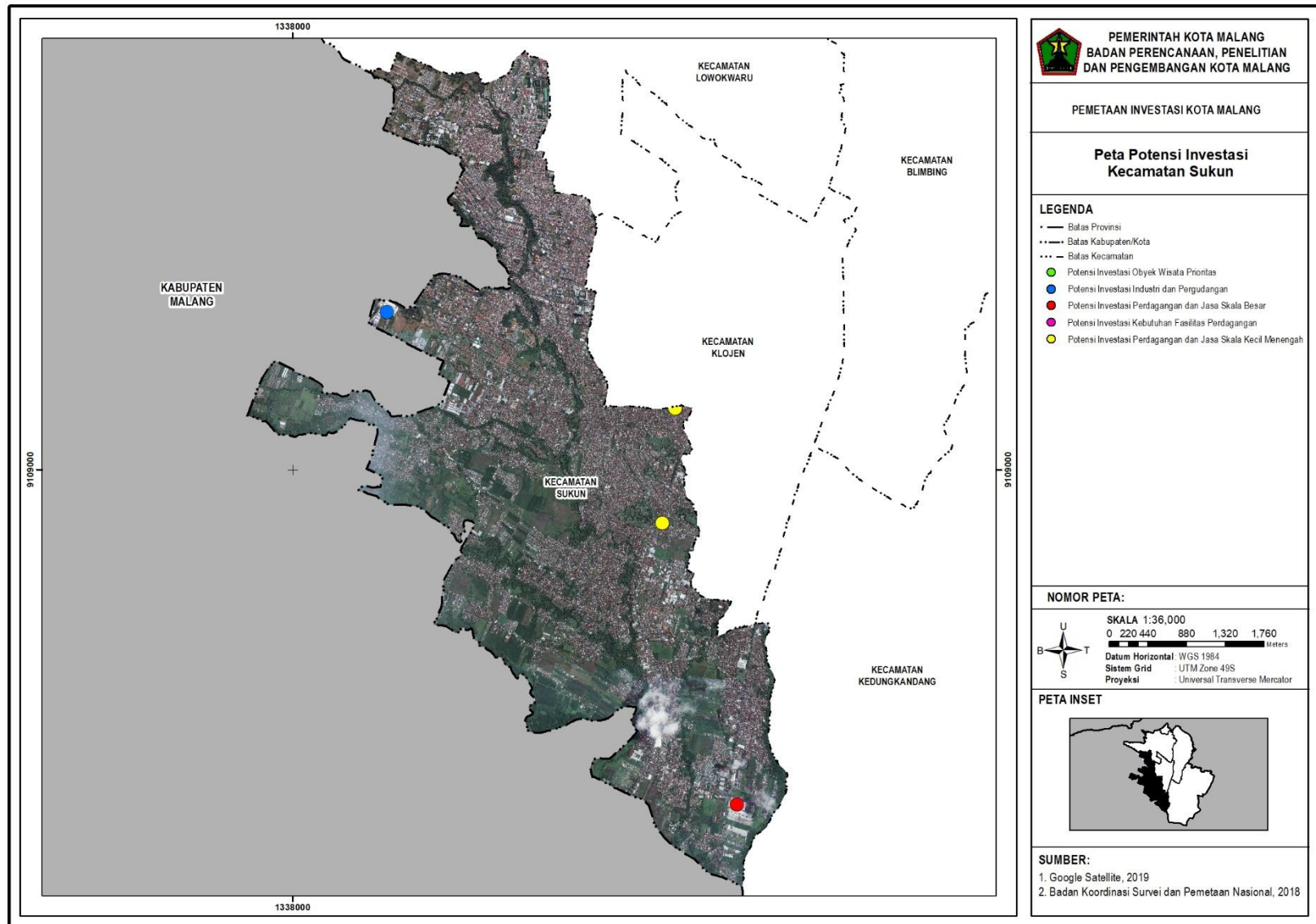
Peta IV-13. Peta Potensi Investasi Kecamatan Kedungkandang



Peta IV-14. Peta Potensi Investasi Kecamatan Klojen



Peta IV-15. Peta Potensi Investasi Kecamatan Lowokwaru



Peta IV-16. Peta Potensi Investasi Kecamatan Sukun

#### 4.5.2 Sekilas indikator ketenagakerjaan Kota Malang

Kota Malang sebagai kota terbesar ke dua besar di Jawa Timur memiliki daya tarik besar dalam sektor ekonomi bagi para pencari kerja untuk mencoba peruntungannya. Hal tersebut didukung dengan keberadaan beberapa lembaga pendidikan tinggi ternama baik negeri maupun swasta; serta obyek-obyek wisata yang menarik. Sehingga menjadi sebuah keniscayaan bahwa faktor urbanisasi akan semakin meningkatkan persaingan dalam pasar kerja di Kota Malang.

Berdasarkan data dari BPS Kota Malang (2020); pada Agustus 2019; jumlah penduduk usia kerja di Kota Malang terjadi penambahan sekitar 5;6 ribu orang menjadi 695;38 ribu orang dibanding periode Agustus 2018; atau meningkat 0;81 persen. Walaupun dalam unsur pertumbuhan penduduk usia kerja terdapat pengaruh migrasi baik masuk ke atau keluar Kota Malang; namun data awal yang digunakan untuk rilis data ketenagakerjaan kali ini belum dapat untuk mengkaji seberapa besar dorongan migrasi mempengaruhi penambahan usia kerja pada periode Agustus 2019.

Pada sisi lain; seiring dengan penambahan penduduk usia kerja terdapat pula peningkatan jumlah angkatan kerja yang terjun ke pasar kerja pada Agustus 2019 di Kota Malang. Pada periode ini terjadi penambahan angkatan kerja sebesar 3;4 ribu orang menjadi 458;22 ribu orang atau meningkat 0;74 persen. Dengan memperhatikan proporsi peningkatan jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja; besar kemungkinan peningkatan penduduk angkatan kerja kali ini lebih dominan dipengaruhi oleh angkatan kerja baru. Angkatan kerja baru dapat berasal dari penduduk yang memasuki usia kerja dan terjun dalam pasar kerja; atau penduduk usia kerja yang telah menamatkan pendidikan. Jika melihat komposisi penduduk; kelompok mereka yang baru lulus kuliah yang cukup banyak di Kota Malang. Sebagian langsung mencari pekerjaan dengan mengajukan lamaran pekerjaan; namun ada pula sebagian lain yang memutuskan untuk menunda untuk masuk ke dunia kerja.

**Tabel 4-9.** Penduduk Kota Malang Usia 15 Tahun atau Lebih menurut Jenis Kegiatan Utama; Agustus 2018 dan Agustus 2019

Jenis Kegiatan Utama	Satuan	Agustus 2018	Agustus 2019	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penduduk Usia Kerja (usia 15 tahun atau lebih)	<i>orang</i>	<b>689.812</b>	<b>695.378</b>	<b>5.566</b>
2. Angkatan Kerja (AK)	<i>orang</i>	<b>454.849</b>	<b>458.216</b>	<b>3.367</b>
<i>Bekerja</i>	<i>orang</i>	423.951	430.552	6.601
<i>Pengangguran</i>	<i>orang</i>	30.898	27.664	-3.234
3. Bukan Angkatan Kerja (BAK)	<i>orang</i>	<b>234.963</b>	<b>237.162</b>	<b>2.199</b>
<i>Sekolah</i>	<i>orang</i>	82.885	77.744	-5.141
<i>Mengurus Rumah Tangga</i>	<i>orang</i>	131.413	134.013	2.600
<i>Lainnya</i>	<i>orang</i>	20.665	25.405	4.740
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	<i>persen</i>	<b>65,94</b>	<b>65,89</b>	<b>-0,05</b>
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	<i>persen</i>	<b>6,79</b>	<b>6,04</b>	<b>-0,75</b>

Sumber: BPS Kota Malang; 2020.

Pada Agustus 2019; kelompok kegiatan mengurus rumahtangga bertambah 2;6 ribu orang; sedangkan mereka yang melakukan kegiatan lainnya juga naik sekitar 4;74 ribu orang. Sementara penduduk bukan usia kerja yang sedang sekolah mengalami penurunan sekitar 5;1 ribu orang. Penurunan tersebut sangat mungkin terjadi karena penduduk Kota Malang yang sekolah utamanya pada perguruan tinggi cukup besar dan sangat dinamis. Mereka umumnya adalah pendatang yang bertujuan untuk sekolah; tapi tidak sedikit yang sekaligus masuk dalam pasar kerja. Artinya kelompok ini sebenarnya mempunyai potensi besar untuk berpartisipasi di pasar kerja; dan selama ini sedang mengintai peluang di tengah aktivitasnya sebagai pelajar.

Komposisi pendidikan masyarakat di pasar kerja dapat memberikan informasi menarik. Pada kelompok berpendidikan SMP ke bawah mengalami penurunan; dan sebaliknya terjadi penambahan agregat pada tingkat pendidikan SLTA ke atas. Informasi tersebut menggambarkan terjadinya pergeseran potensi angkatan kerja ke arah karakteristik pendidikan atau keahlian yang lebih baik. Sementara penurunan jumlah angkatan kerja yang berpendidikan universitas dapat disebabkan oleh faktor migrasi. Misalnya mereka yang sebelumnya masih tinggal di Kota Malang selepas lulus kuliah dan mencari kerja; sudah kembali ke daerah asal atau mendapat pekerjaan di luar Kota Malang.



Karakteristik pendidikan masyarakat di dalam pasar kerja yang semakin baik; berdampak pada perilaku dari sisi supply. Mereka cenderung memiliki nilai tawar (*bargaining power*) yang semakin baik pula; serta lebih produktif dalam dunia kerja karena memiliki kemampuan (*skill*) yang baik. Tentunya hal ini bukan sekedar menjadi potensi tetapi juga merupakan tantangan bagi pemerintah. Potensi yang baik jika tidak dikelola dengan baik atau tidak terserap dalam lapangan usaha dapat menjadi masalah sosial. Maka penciptaan iklim usaha melalui berbagai kebijakan di bidang ekonomi menjadi hal sangat penting.

#### 4.5.3 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Salah satu indikator yang dapat menjelaskan potensi dan karakteristik ekonomi sebuah wilayah adalah jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha. Secara nasional penyajian data hasil Sakernas yang berkenaan dengan pengelompokan sektor ekonomi mulai menggunakan 14 kategori lapangan pekerjaan menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2015. Namun karena keterbatasan sampel pada level kabupaten/kota; sementara dalam ulasan ini disajikan dalam tiga kelompok lapangan usaha seperti pada Tabel 4-10. Pertama kelompok lapangan usaha Pertanian yang terdiri dari Kategori A sesuai KBLI 2015. Kemudian ke dua yaitu kelompok lapangan usaha Manufaktur; merupakan gabungan Kategori B; C; D; E; dan F. Serta terakhir adalah kelompok lapangan usaha Jasa-jasa; gabungan kategori lainnya mulai dari G hingga U.

Penduduk usia kerja yang bekerja di Kota Malang pada Agustus 2019 dominan berada pada kelompok lapangan usaha Jasa-jasa yang mencapai 327.378 orang atau 76;04 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 22 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kedua kelompok lapangan usaha lainnya mengalami penurunan. Kelompok Manufaktur yang masih menyumbang 22;80 persen tenaga kerja di Kota Malang pada Agustus 2019 turun sekitar 12;91 ribu orang. Kemudian pada kelompok Pertanian hanya terdapat 1;16 persen tenaga kerja.

**Tabel 4-10.** Penduduk Kota Malang Usia 15 Tahun atau Lebih yang Bekerja menurut Kategori Lapangan Pekerjaan Utama; Agustus 2018 dan Agustus 2019 (Jiwa/persen)

Kategori Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2018	Agustus 2019	Perubahan (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	7.586 (1,79%)	4.990 (1,16%)	-2.596
Manufaktur	111.102 (26,21%)	98.184 (22,80%)	-12.918
Jasa-Jasa	305.263 (72,00%)	327.378 (76,04%)	22.115
<b>Jumlah</b>	<b>423.951</b> <b>(100,00%)</b>	<b>430.552</b> <b>(1,79%)</b>	<b>6.601</b>

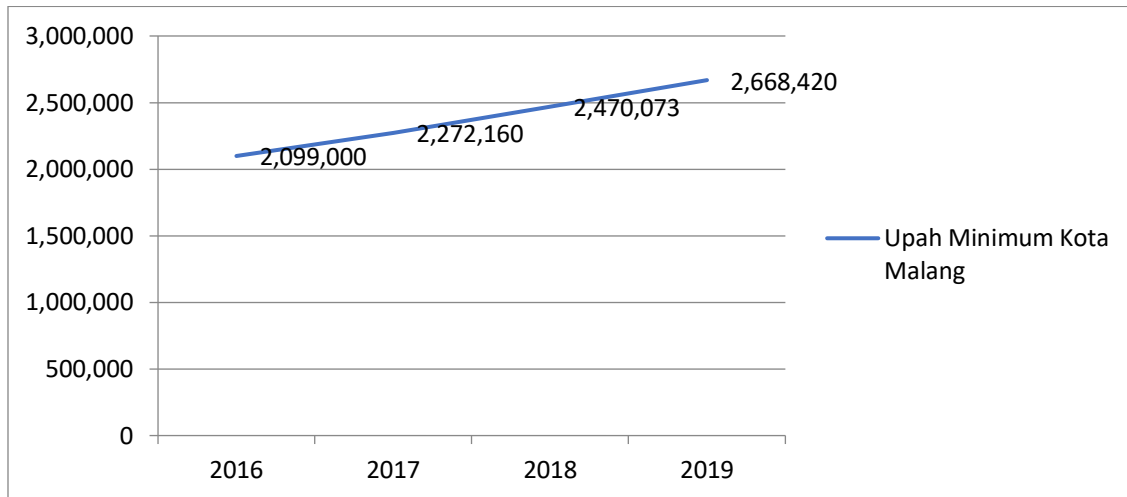
Sumber: BPS Kota Malang; 2020

Ketiga kategori yang utama tersebut menggambarkan ciri dari Kota Malang sebagai wilayah perkotaan; yaitu semakin majunya kelompok lapangan usaha tersier atau Jasa-jasa. Secara umum jika dibandingkan dengan kondisi Tahun 2018; ketiganya mengalami peningkatan daya serap pekerja secara agregat pada periode Agustus 2019.

#### 4.5.4 Upah Minimum Kota Malang

Upah minimum Kota Malang terus meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Berikut ini merupakan grafik peningkatan Upah Minimum Kota Malang tahun 2016-2019.

**Gambar 4-2.** Upah Minimum Kota Malang; Tahun 2016-2019



Sumber: BPS Kota Malang; 2020.

Grafik di atas; menunjukkan bahwa setiap tahunnya upah minimum di Kota Malang terus meningkat. Upah Minimum Kota Malang Tahun 2016 sebesar Rp 2.099.000; selanjutnya tahun 2017 meningkat 10% menjadi Rp 2.272.160. Sama halnya pada tahun 2018 Upah Minimum meningkat menjadi Rp 2.470.073 dan tahun 2019 meningkat menjadi Rp 2.668.420.

## BAB V. Penutup

Berdasarkan penjabaran yang ada pembahasan di atas, maka diperoleh kesimpulan mengenai:

- Wilayah-wilayah (kecamatan) yang terdapat di Kota Malang dengan potensi investasinya yakni:
  1. Kecamatan Blimbing.  
Pada kecamatan ini terdapat potensi investasi obyek wisata prioritas; industri dan perdagangan; serta perdagangan dan jasa skala kecil menengah.
  2. Kecamatan Kedungkandang.  
Pada Kecamatan ini, relative terdapat lebih sedikit investasi dan hanya muncul potensi di bidang investasi perdagangan dan jasa skala kecil menengah.
  3. Kecamatan Klojen  
Pada kecamatan ini, banyak investasi berupa obyek wisata prioritas diikuti dengan potensi di bidang perdagangan dan jasa skala kecil menengah; investasi di bidang industri dan perdagangan; serta investasi di bidang kebutuhan fasilitas perdagangan.
  4. Kecamatan Lowokwaru  
Pada Kecamatan Lowokwaru, potensi investasi yang muncul adalah potensi investasi obyek wisata prioritas; dan potensi investasi bidang perdagangan dan jasa skala kecil menengah.
  5. Kecamatan Sukun  
Pada Kecamatan Sukun, terdapat potensi investasi di bidang Perdagangan dan jasa skala besar; industri dan perdagangan; serta perdagangan dan jasa skala kecil menengah.
- Perubahan karakteristik perekonomian kota Malang ditinjau berdasarkan analisis *shift-share* diketahui bahwa sektor yang mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan sektoral Provinsi Jawa Timur yakni: sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 803,4504. Selain itu, sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektoral Provinsi Jawa Timur (*Mix Share* ( $m_{ij}$ )) ialah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Jasa Keuangan dan Asuransi.



- Sektor-sektor yang memiliki daya saing yang tinggi dilihat berdasarkan perhitungan *Differential Shift* ( $C_{ij}$ ) terdapat pada Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya. Sektor ekonomi yang memiliki daya saing paling tinggi dari seluruh sektor ekonomi di Kota Malang dalam pangsa pasar wilayah adalah sektor Industri Pengolahan.



## Daftar Pustaka

- Abe; Alexander. 1994. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Anna; Chingarande. 2012. *The Impact of Interest Rates on Foreign Direct Investment: A Case Study of the Zimbabwean Economy (February 2009 – June 2011)*. International Journal of Management Sciences and Business Research; 1(5); pp: 1-24.
- Arsyad; Lincolin. 2016. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi ke-5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Awan; M.Z.;Khan; B.;dan Uz Zaman; K. 2011. *Economic Determinants of Foreign Direct Investment (FDI) in Commodity Producing Sector: A Case Study of Pakistan*. African Journal of Business Management; 5(2); pp: 537-545.
- Bappenas. (2020). Paket Kebijakan Ekonomi. Diambil kembali dari Kementerian PPN/Bappenas: <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/publikasi/paket-kebijakan-ekonomi>
- BPKM. (2019; Oktober 31). Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan III dan Januari - September Tahun 2019. Diambil kembali dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI: [https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file\\_siaran\\_pers/Paparan\\_Bahasa\\_Indonesia\\_TW\\_III\\_2019.pdf](https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Paparan_Bahasa_Indonesia_TW_III_2019.pdf)
- Blanchard; Olivier. 2017. *Macroeconomics*. 7<sup>th</sup> ed. New York: Pearson.
- Boediono. 2015. *Ekonomi Makro*. Edisi ke-4. Yogyakarta: BPFE.
- BPS. (2019). Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kota Malang 2014-2018. BPS Kota Malang. Diambil kembali dari <https://malangkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YTg4ODFIMmQxYmM0ZmZkMzU0YzU4Yjk1&xzmn=aHR0cHM6Ly9tYWxhbmdrb3RhLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvi8yMDE5LzA5LzA2L2E4ODgxZTJkMWJjNGZmZDM1NGM1OGI5NS9wcm9kdWstZG9tZXN0aWstcmVnaW9uYWwtYnJldG8ta290YS1tY>
- Dewi; Putu K.; dan Triaryati; N. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi; Suku Bunga; dan Pajak Terhadap Investasi Asing Langsung*. Jurnal Manajemen UNUD; 4(4): h: 866-878
- Domar; Evsey D. 1947. *Expansion and Employment*. The American Economic Review; Vol. 37(1) pp. 34-55.
- Hanim; Anifatul dan Ragimun. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi di Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Jember Jawa Timur*. Kajian Ekonomi dan Keuangan Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Vol.14 No.3.
- Harrod; Roy F. 1939. *An Essay in Dynamic Theory*. The Economic Journal; Vol. 49 (193); pp. 14-33.



- Herlianto; Didit. 2013. *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Insah; Baba. 2013. *Foreign Direct Investment Inflows and Economic Growth in Ghana*. International Journal of Economic Practices and Theories; 3(2); pp:115 - 121
- Kuncoro; Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. Edisi ke-5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuznets; Simon. 1955. *Economic Growth and Inequality*. The American Economic Review 63 (3): 247–258.
- Mankiw; Nicholas G. 2016. *Macroeconomics*. 9<sup>th</sup> ed. New York: Worth.
- Meier; Gerald M. 1995. *Leading Issues in Economic Development*. 6<sup>th</sup> ed. New York: Oxford University Press.
- Samuelson; Paul dan Nordhaus; William. 2004. *Economics*. 18<sup>th</sup> Edition. New York: McGraw-Hill.
- Sarwedi. 2002. *Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan UKP; 4(1): h: 17-35.
- Sharpe; W.F.; Alexander; G.J.; Bailey; J.V. 2001. *Fundamentals of Investments*. 3<sup>rd</sup> Edition. New York: Pearson.
- Shiddiq; M. Al-Jawi. 2007. *Menciptakan Iklim Bisnis yang Sehat dan Kondusif*. Diakses pada 2 Februari 2020. <https://ayok.wordpress.com/2007/01/18/menciptakan-iklim-bisnis-yang-sehat-dan-kondusif/>
- Sinarasri; Andwiani.; Hardiwinoto; dan Faturrohman; Akhmad. 2014. *Analisis Potensi Investasi di Kota Semarang*. Semarang: Jurnal UNIMUS Semarang.
- Solow; Robert Merton. 1956. *A Contribution to the Theory of Economic Growth*. Quarterly Journal of Economics; 65–94.
- Sukirno; Sadono. 1994. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Edisi ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutiaji. 2019. *Pemkot Malang Buka Keran Investasi*. Diakses pada 3 Februari 2020. <https://malangkota.go.id/2019/10/24/pemkot-malang-buka-keran-investasi/>
- Tambunan; Tulus. 2006. *Iklim Investasi di Indonesia: Masalah; Tantangan; dan Potensi*. Diakses pada 2 Februari 2020. [http://www.kadin-indonesia.or.id/id/doc/opini/Iklim\\_Investasi\\_Di\\_Indonesia\\_Masalah;Tantangan\\_Dan\\_Potensi.pdf](http://www.kadin-indonesia.or.id/id/doc/opini/Iklim_Investasi_Di_Indonesia_Masalah;Tantangan_Dan_Potensi.pdf)
- Tarigan; R. 2004. *Ekonomi Regional; Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tendelilin; Eduardus. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Edisi ke-1. Yogyakarta: BPFPE.
- Todaro; Michael P.; dan Smith; Stephen C. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke-11 Jilid 1. Jakarta: Erlangga.